



PEMERINTAH
KABUPATEN
BADUNG

2020



UKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019**





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP. (0361) 9009245,9009246, Fax : (0361) 9009245

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung untuk Tahun 2019 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Badung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas. Laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mangupura, 20 Maret 2020

Inspektur Kabupaten Badung,



Luh Suryanti, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690323 198903 2 012

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,



Atas Asung Kerta Wara Nugraha dari Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Reriu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati wajib menyusun Laporan Kinerja (LKjIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ketiga dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Sesuai Visi RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 yaitu “*Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera*” akan diwujudkan dengan 13 tujuan yang terdiri dari 20 sasaran strategis dan diukur dengan 21 indikator kinerja utama (IKU). Laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung tahun 2019 berisikan laporan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat serta kepada masyarakat sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus meningkatkan efektivitas program/kegiatan (*refocusing program*) dengan mengutamakan program prioritas sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021 untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui perubahan *mindset* dan penyalarsan program/kegiatan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *efektif, efisien, akuntabel* dan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Badung mulai dirasakan manfaatnya hal ini tampak dari perubahan *mindset* dan disiplin ASN sebagai tuntutan dari budaya kinerja yang lambat laun mulai tumbuh dan akan terus kami dorong serta *efisiensi*

anggaran sebagai akibat adanya penyalarsan program / kegiatan dengan sasaran RPJMD.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja khususnya kepada jajaran Kementerian PAN dan RB atas perhatian dan pembinaannya selama ini, untuk selanjutnya dengan komitmen dan kerja keras, kami bertekad untuk bisa lebih baik untuk mewujudkan implementasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Badung.

Sekian dan Terima kasih

Om Santih, Santih, Santih, Om

Mangupura, 5 Maret 2020
Bupati Badung,



I NYOMAN GIRI PRASTA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang dibuat dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menguraikan tentang hasil capaian serta faktor pendorong dan penghambat dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi dalam kurun waktu satu tahun yang tertuang dalam RPJMD.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 dengan visi “*Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera*” terdiri dari 9 (sembilan) misi, 13 (tiga belas) Tujuan, 20 (dua puluh) sasaran strategis dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama (IKU).

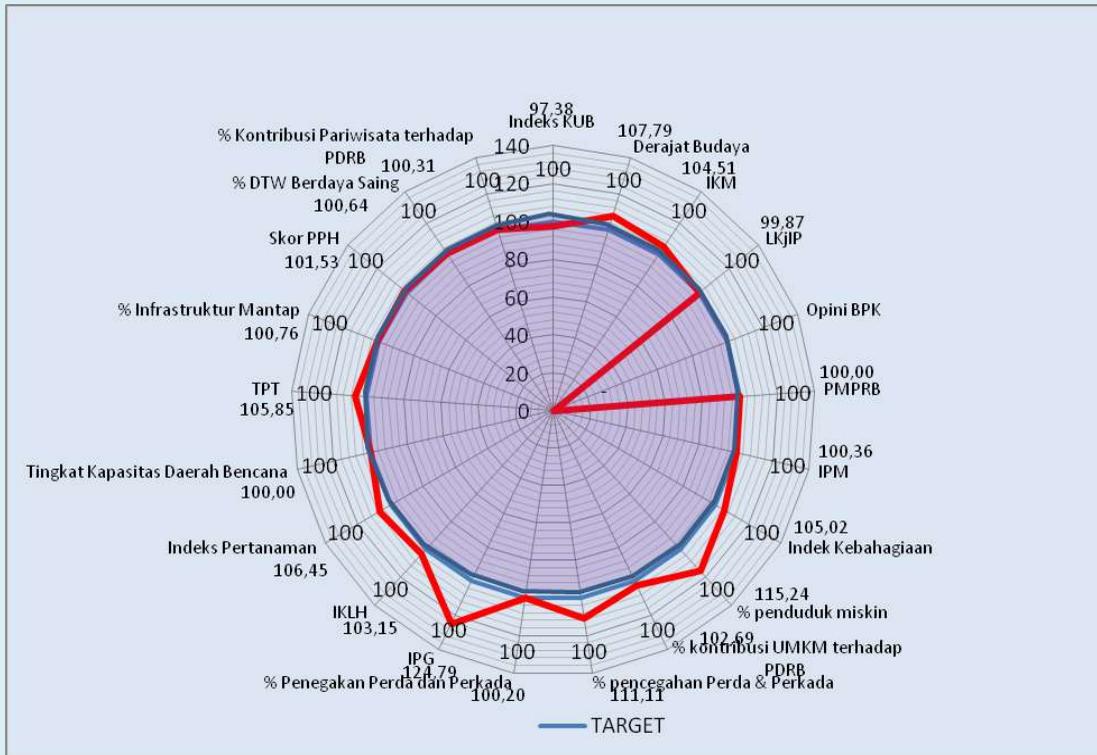
Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019, dari 21 Indikator Kinerja Utama yang dapat diukur sebanyak 20 Indikator dan 1 (satu) Indikator belum dapat diukur yaitu Opini BPK dari Badan Pemeriksa Keuangan karena data belum diumumkan/*publish*.

Capaian kinerja sasaran strategis RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung untuk tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja secara keseluruhan dari 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama (IKU) telah mencapai kinerja rata-rata sebesar 104,38%, lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata tahun 2018 sebesar 101,94%.

Hasil pengukuran terhadap 20 indikator kinerja utama diperoleh hasil antara lain: melebihi target (>100%) sebanyak 16 indikator kinerja utama (80,00%), sesuai target (100%) sebanyak 2 indikator kinerja utama (10,00%) dan dibawah target (<100%) sebanyak 2 indikator kinerja utama (10,00%)



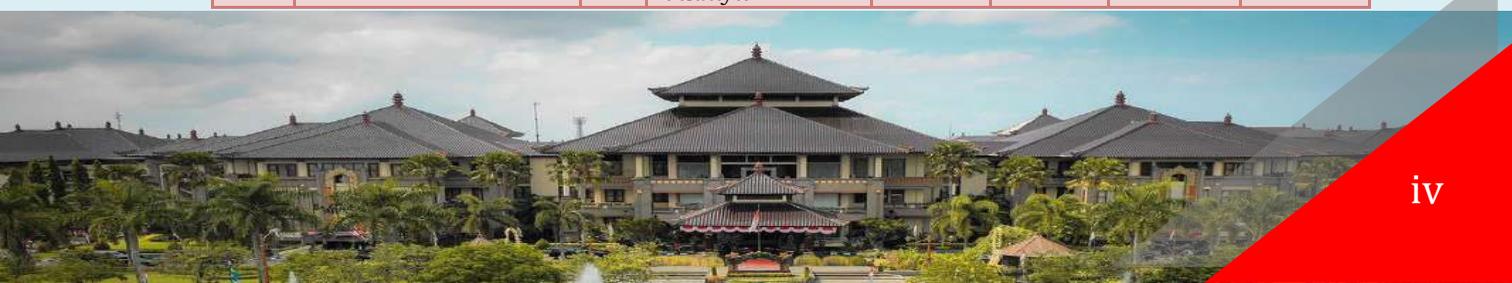
Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) secara keseluruhan 20 indikator menunjukkan lebih dominan mencapai target yaitu sebanyak 18 indikator (90,00%) dan 2 indikator yang belum mencapai target (< 100%) sebesar 10.00%.



Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 822.283.070.004,28,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 750.904.939.175,12,- dengan persentase penyerapan sebesar 91,32%.

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis seperti berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	82,4	80,24	97,38
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	77	83	107,79



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	80	83,61	104,51
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4.	Kategori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78	77,9	99,87
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5.	Opini BPK	Nilai	WTP	Belum Rilis BPK (WTP)	-
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6.	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	BB	BB	100
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,3	81,59	100,36
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8.	Indek Kebahagiaan	Nilai	72,5	76,14	105,02
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase penduduk miskin	%	2,15-2,10%	1,78	115,24
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,80	8,01	102,69
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11.	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	90	100	111,11
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	85	85,17	100,20
13.	Meningkatnya pengarasutamaan gender	13.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	75,87	94,68	124,79



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	67,94	70,077	103,15
		15.	Indeks Pertanaman	Nilai	205	218,22	106,45
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100,00
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,325	0,306	105,85
17.	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	99,25	100	100,76
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5	95,95	101,53
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20.	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	69,00	69,44	100,64
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,58	28,67	100,31

Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya toleransi hidup beragama melalui :

- a. Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*.
- b. Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan.
- c. Membangun dan mengembangkan FGD dari tingkat Kabupaten sampai desa dan kelurahan, melaksanakan outing, dan jambore pada generasi muda lintas agama sehingga akan tumbuh pemahanan ajaran agama



secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat

- d. Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.

Upaya perbaikan terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten melalui perbaikan akuntabilitas sesuai rekomendasi hasil evaluasi dari kementerian PAN dan RB yaitu :

- a. Bagian organisasi melakukan bimbingan teknis dan pembinaan ke perangkat daerah untuk peningkatan pemahaman SAKIP oleh kepala perangkat daerah
- b. Perangkat daerah melakukan penyempurnaan cascading kinerja dan optimalisasi proses bisnis pinerja utama organisasi
- c. Bagian organisasi melakukan rapat koordinasi dengan BKPSDM untuk penyelarasan ukuran kinerja setiap jenjang jabatan sampai individu serta memastikan PK dan SKP berorientasi hasil
- d. Bappeda melakukan identifikasi *crosscutting* program dan melakukan koordinasi antar unit kerja OPD dan secara kolaboratif
- e. Bappeda dan bagian organisasi melakukan koordinasi dengan BPKP Provinsi Bali untuk pemanfaatan sistem informasi simda terintegrasi.
- f. Inspektorat akan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	PENDAHULUAN 1
	1.1. Latar Belakang 1
	1.2. Gambaran Umum Kabupaten Badung 3
	1.3. Gambaran Perekonomian 6
	1.4. Gambaran Pemerintahan 12
	1.5. Gambaran Sumber Daya Aparatur 16
	1.6. Sumber Daya Keuangan 19
	1.7. Isu Strategis 20
	1.8. Arah Kebijakan 21
	1.9. Ruang Lingkup 26
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 27
	2.1. RPJMD Semesta Berencana 2016 – 2021 27
	2.2. Perjanjian Kinerja 32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 34
	3.1. Potret Pengukuran dan Capaian Kinerja tahun 2019 34
	3.2. Analisis Capaian Kinerja 37
	3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan 112
	3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 114
	3.5. Prestasi/Penghargaan 116
BAB IV	PENUTUP 123



4.1. Kesimpulan	123
4.2. Upaya Perbaikan Kinerja	124
LAMPIRAN :	
Lampiran I : Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019	126
Lampiran II : Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019	128
Lampiran III : Hasil Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019	130
Lampiran IV Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2019	132
Lampiran V : Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintahkabupaten Badung Tahun 2016-2021	134



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung 4
Tabel 1.2	Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2018-2019 5
Tabel 1.3	Jumlah, Tipe dan Jumlah Jabatan Struktural Di Kabupaten Badung Tahun 2019 13
Tabel 1.4	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Badung Tahun 2019 16
Tabel 1.5	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2019 17
Tabel 1.6	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2019 17
Tabel 1.7	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut status jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2019 18
Tabel 1.8	Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2019 19
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 28
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019 33
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019 35
Tabel 3.2	Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2019 44
Tabel 3.3	Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang di Kabupaten Badung Tahun 2019 44
Tabel 3.4	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 46
Tabel 3.5	Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 75
Tabel 3.6	Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2019 77
Tabel 3.7	Jenis Pelanggaran yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2019 79
Tabel 3.8	Hasil Analisis Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Badung Tahun 2019 84
Tabel 3.9	Hasil Analisis Indeks Kualitas Air di Kabupaten Badung Tahun 2019 84



Tabel 3.10	Hasil Analisis Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Badung, Tahun 2019	85
Tabel 3.11	IKLH Kabupaten Badung Tahun 2019	85
Tabel 3.12	Distribusi IP menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2019	89
Tabel 3.13	Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2019	92
Tabel 3.14	Distribusi Tingkat Penggangguran di Kabupaten Badung Tahun 2019	97
Tabel 3.15	Distribusi Panjang Jalan dan Kondisi Jalan per Kecamatan di Kabupeten Badung Tahun 2019	100
Tabel 3.16	Jumlah Produksi Perikanan dan Kebutuhan Ikan di Kabupeten Badung Tahun 2015-2019	105
Tabel 3.17	Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupeten Badung Tahun 2019	108
Tabel 3.18	Distribusi PDRB Kabupeten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019	111
Tabel 3.19	Sasaran Strategis, Jumlah Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2019	113
Tabel 3.20	Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program/Kegiatan di Kabupaten Badung Tahun 2019	115
Tabel 3.21	Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2019	116



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>	
Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung tahun 2019	5
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2015-2019	6
Grafik 1.3	Garis Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2015-2019	7
Grafik 1.4	Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019	8
Grafik 1.5	Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019	9
Grafik 1.6	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2015-2019	10
Grafik 1.7	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung Menurut Asal Negara Tahun 2019	10
Grafik 1.8	Perkembangan Usaha Sarana Pariwisata di Kabupaten Badung Tahun 2016-2019	11
Grafik 1.9	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung	12
Grafik 1.10	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015-2019	20
Grafik 2.1	Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021	30
Grafik 2.2	Cross Cutting Program Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021	31
Grafik 3.1	Target dan Capaian Indiaktor Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	38
Grafik 3.2	Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2017-2019	39
Grafik 3.3	Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2018-2019	40
Grafik 3.4	Perbandingan target dan Realisasi Indikator Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Tahun 2017-2021	43
Grafik 3.5	Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	47
Grafik 3.6	Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019	48
Grafik 3.7	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2019	49



Grafik 3.8	Hasil Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2019	50
Grafik 3.9	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	53
Grafik 3.10	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2019	54
Grafik 3.11	Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Kabupaten BADung Tahun 2018-2019	54
Grafik 3.12	Perbandingan efisiensi Anggaran dan Program/Kegiatan dengan Penerapan SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2017-2019	56
Grafik 3.13	Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks PMPRB) Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	59
Grafik 3.14	Perbandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2016-2019	60
Grafik 3.15	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit dan Hasil Kabupaten Badung Tahun 2016-2019	60
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	63
Grafik 3.17	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2019	64
Grafik 3.18	Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	66
Grafik 3.19	Perbandingan Hasil penilaian Indikator Indeks Kebahagiaan menurut komponen Di Kabupaten Badung Tahun 2018-2019	67
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	71
Grafik 3.21	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019	71
Grafik 3.22	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017-2019	72
Grafik 3.23	Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	73
Grafik 3.24	Target dan Capaian Indikator Persentase Pencegahan Perda dan Perkda di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	76
Grafik 3.25	Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkda di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	78
Grafik 3.26	Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	81
Grafik 3.27	Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung Tahun 2017-2019	82



Grafik 3.28	Distribusi Indeks Pembangunan Gender Menurut Komponen di Kabupaten Badung Tahun 2018-2019	82
Grafik 3.29	Perbandingan Hasil IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019	86
Grafik 3.30	Target dan Capaian Indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	88
Grafik 3.31	Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2017 - 2021	91
Grafik 3.32	Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2019	91
Grafik 3.33	Desa Tangguh Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2019	93
Grafik 3.34	Sekolah Aman Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2019	94
Grafik 3.35	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	96
Grafik 3.36	Tingkat Pengangguran terbuka di Indonesia Tahun 2019	96
Grafik 3.37	Target dan Capaian Indikator Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	99
Grafik 3.38	Target dan Capaian Indikator Skor Pola Panga Harapan (PPH) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	103
Grafik 3.39	Perbandingan Skor PPH Kabupaten Badung dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2019	103
Grafik 3.40	Jumlah Hasil Produksi Pertanian di Kabupaten Badung Tahun 2016-2019	104
Grafik 3.41	Target dan Realisasi Indikator Persentase Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing di Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	108
Grafik 3.42	Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	110





BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pencapaian kinerja disajikan dengan informasi ketercapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang





memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru.

Penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung;





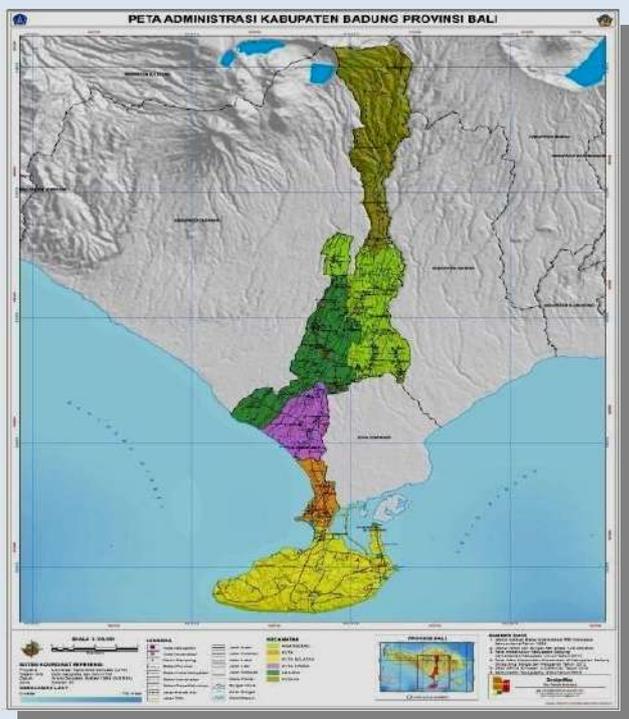
- Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;



Gambaran Umum Kabupaten Badung

1.2.1 Gambaran Geografis

Badung merupakan salah satu dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali yang terletak dibagian paling selatan dari pulau Bali. Secara geografis Kabupaten



Badung terletak antara 8°14'20" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" dan 115°26'51" Bujur Timur. Dengan batas wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah Timur, Kabupaten Tabanan disebelah barat serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan.

Secara administratif, terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Petang merupakan kecamatan terluas dengan luas 115 Km² sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 17,52 km².

Disamping memiliki desa/kelurahan yang sering disebut desa dinas, terdapat 122 desa adat, 531 Banjar adat dan Sekaa Teruna yaitu kelompok pemuda/pemudi (sekaa) yang bernaung dibawah desa adat sebagai bentuk kearifan lokal. Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda dimana desa dinas





melayani administrasi pemerintahan sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya.

Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 km² atau sekitar 7,43 persen luas wilayah Provinsi Bali, dengan wilayah terluas Kecamatan Petang sebesar 115 km² atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan Kuta dengan wilayah terkecil, yaitu seluas 17,52 km² atau 4,19 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	101.13	24.16
2.	Kuta	17.52	4.19
3.	Kuta Utara	33.86	8.09
4.	Mengwi	82	19.59
5.	Abiansemal	69.01	16.49
6.	Petang	115	27.48
TOTAL		418.52	100

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2020

Kabupaten Badung mengalami 2 musim yaitu ; musim kemarau dan musim penghujan. Hal ini dipengaruhi oleh arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya uap air yang dikandungnya. Curah Hujan dengan kondisi normal cukup tinggi. Perbedaan yang paling rendah pada bulan Februari yaitu 13,97 persen dari kondisi normal. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei yaitu 1,80 mm.

1.2.2 Gambaran Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Badung sampai dengan data semester II tahun 2019 sebanyak 490.564 jiwa, yang terdiri dari 244,691 jiwa penduduk laki-laki (49,88%) dan 245.873 jiwa penduduk perempuan (50,12%). Distribusi Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 124.365 jiwa atau 25,35% dari total penduduk Kabupaten Badung, sementara kecamatan Petang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 30.812 jiwa (6,36%). Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Badung seperti tabel 1.2 berikut :





Tabel 1.2
 Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin
 di Kabupaten Badung Tahun 2018-2019

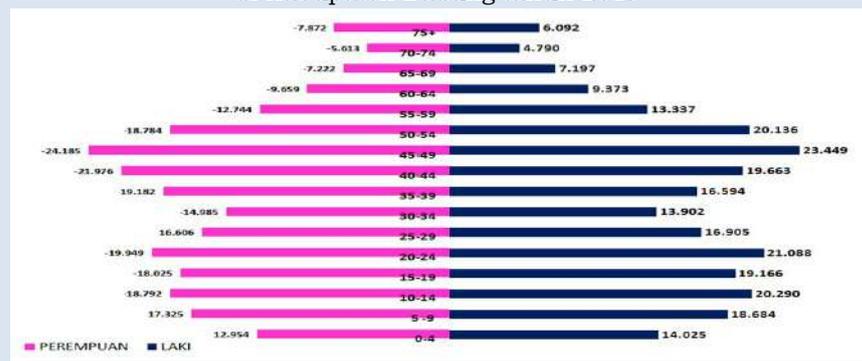
NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI	PEREMPUAN	2019	%	2018
1	Kuta	27.019	26.607	53.626	10,93	52.352
2	Mengwi	61.947	62.418	124.365	25,35	121.651
3	Abiansemal	46.666	47.534	94.200	19,20	92.391
4	Petang	15.762	15.434	31.196	6,36	30.812
5	Kuta Selatan	52.926	53.001	105.927	21,59	100.725
6	Kuta Utara	40.371	40.879	81.250	16,56	78.744
	Kabupaten	244.691	245.873	490.564	100,00	476.675

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung 2019

Pertambahan penduduk tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 13.889 orang. Distribusi pertumbuhan jumlah penduduk menurut kecamatan menunjukkan pertumbuhan penduduk terbanyak di wilayah Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 5.202 jiwa atau sebesar 37,45%, hal ini disebabkan oleh migrasi penduduk pendatang akibat dari pertumbuhan obyek wisata.

Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok umur 45 – 49 tahun yang paling banyak jumlahnya sebanyak 47.634 jiwa. Dari gambaran distribusi penduduk dapat dijelaskan bahwa kelompok umur produktif (35 -54 tahun) yang paling banyak atau disebut bonus demografi. Adapun distribusi penduduk menurut kelompok umur secara lengkap seperti grafik berikut :

Grafik 1.1
 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
 di Kabupaten Badung tahun 2019



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, 2019





Gambaran Perekonomian

1.3.1. Pertumbuhan ekonomi

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung tahun 2015 – 2018 rata-rata diatas 6% dan melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Nasional, sedangkan untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di provinsi bali dan tingkat nasional cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi yang baik karena kontribusi sektor pariwisata terutama berkaitan dengan penanaman modal di bidang hotel, restoran, transportasi dan pembangunan infrastruktur. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional secara lengkap seperti grafik 1.2 berikut :

Grafik 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

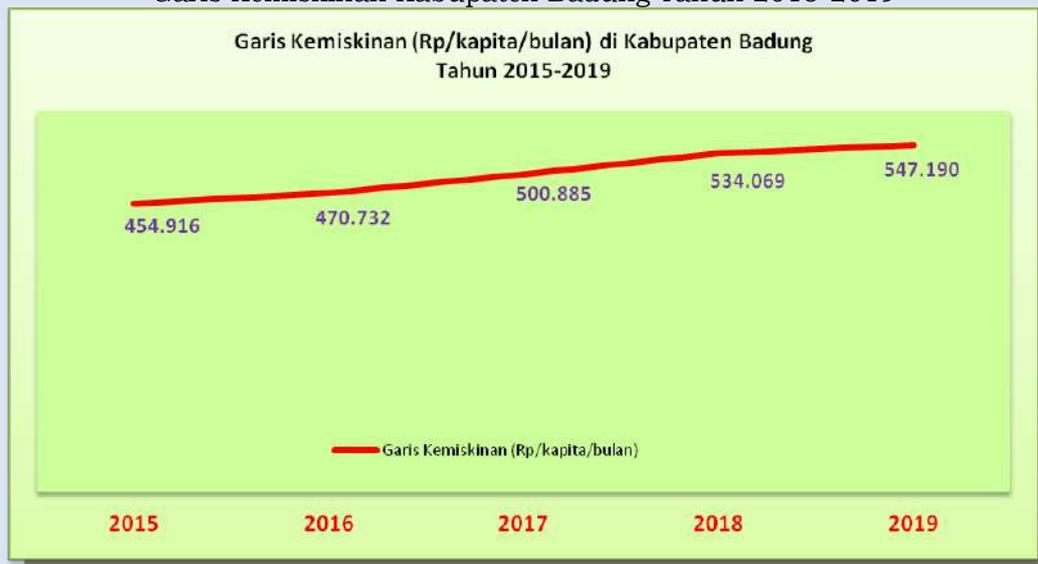




1.3.2. Kemiskinan

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah atau lebih rendah dari besaran yang disebut sebagai Garis Kemiskinan. Batas pengelompokan garis kemiskinan Kabupaten Badung cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 454,916/kapita/bulan menjadi sebesar 547.190/kapita/bulan pada tahun 2019. Secara lengkap garis kemiskinan di Kabupaten Badung seperti grafik 1.3 berikut:

Grafik 1.3
Garis Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

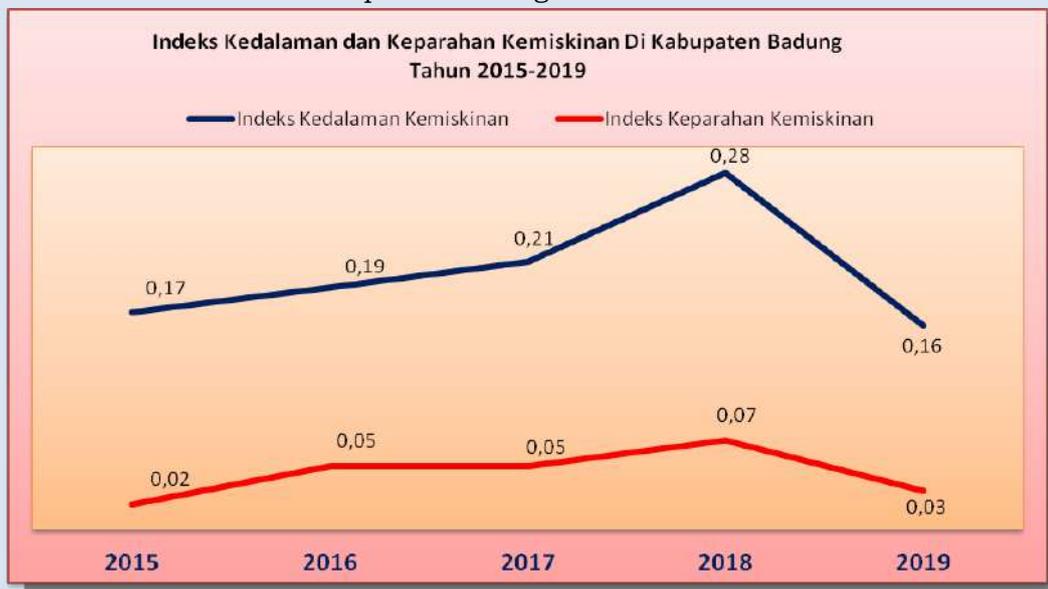
Indikator lain yang bisa disampaikan mendampingi indikator tingkat kemiskinan wilayah, di antaranya adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Badung tercatat mengalami peningkatan pada periode tahun 2015-2018 dengan puncak pada tahun 2018 sebesar 0,28 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,16, demikian juga halnya dengan indeks keparahan kemiskinan. Secara rinci Perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan seperti pada grafik berikut :





Grafik 1.4
Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

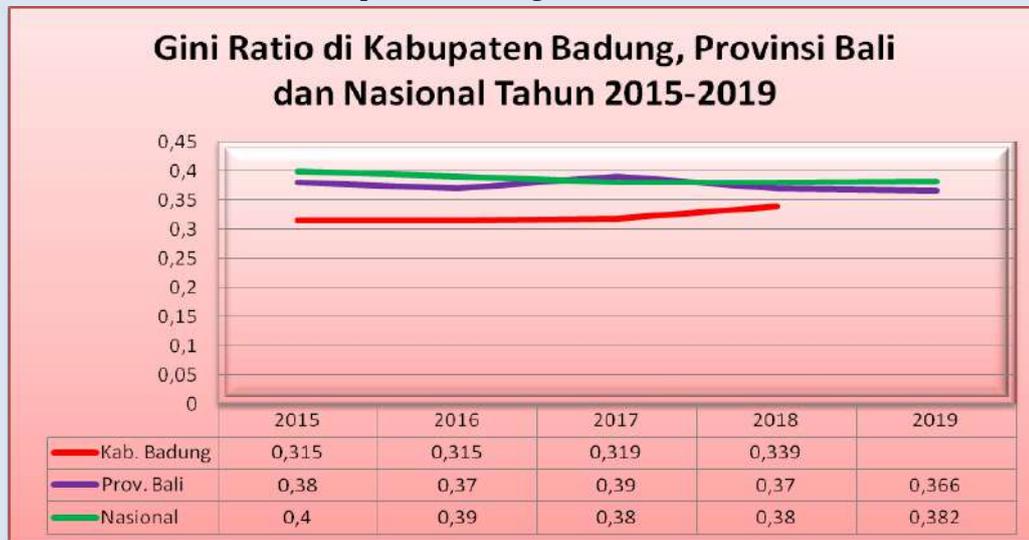
Indikator lain yang biasa juga disertakan mendampingi indikator kemiskinan di antaranya adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk. Salah satu ukuran ketimpangan yang biasa digunakan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adapun kategori nilai indeks gini rasio yaitu: 0-<0,35 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran 0,35-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio > 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2015 hingga Tahun 2018 menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung masih dalam tingkat ketimpangan rendah, namun trennya menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi.

Gini ratio Kabupaten Badung pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,366 dan naik menjadi 0,370 pada September 2019. Perkembangan gini ratio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan nasional Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut :





Grafik 1.5
 Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
 di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Badung sangat serius untuk mengendalikan kemiskinan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung yang pro rakyat seperti:

1. Program kesehatan yang menanggung semua masyarakat (*Universal Health Coverage*) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) serta Program Krama Badung Sehat yaitu program yang melengkapi pelayanan kesehatan yang menanggung pelayanan kesehatan diluar JKN KIS.
2. Program Bedah dan rehab rumah bagi masyarakat miskin
3. Program pemberian santunan lansia bagi masyarakat berumur diatas 60 tahun dan
4. Program Santunan Kematian yaitu setiap masyarakat yang meninggal diberikan santunan kematian sekaligus akte kematian.
5. Program lainnya yang bersifat meringankan beban masyarakat.

1.3.3 Gambaran Kepariwisataaan

Kabupaten Badung merupakan pusat pengembangan dan tujuan wisata di Bali dan Nasional, karena memiliki banyak kawasan destinasi wisata yang sudah terkenal di mancanegara. Perkembangan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mengalami perkembangan yang meningkat sejak tahun 2015-2019 dan mencapai puncak pada tahun 2018 dengan kunjungan wisatawan sebanyak





8.386.520 orang. Perkembangan secara lengkap kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung dari tahun 2015-2019 seperti grafik berikut :

Grafik 1.6

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2015-2019



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2019

Kunjungan wisatawan ke Badung didominasi wisatawan manca Negara. Wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung berasal dari Negara Australia sebanyak 1.206.935 orang.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berdampak pada berkembangnya berbagai usaha penunjang kepariwisataan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 1.7

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung Menurut Asal Negara Tahun 2019

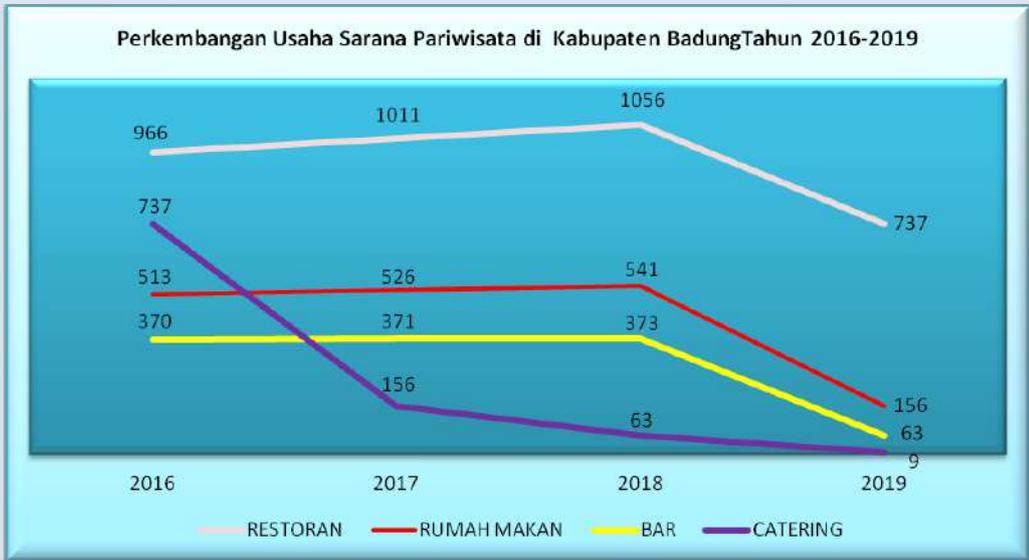


Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2019





Grafik 1.8
Perkembangan Usaha Sarana Pariwisata di Kabupaten Badung Tahun 2016-2019



Perkembangan usaha sarana pariwisata di Kabupaten Badung tercatat sejak tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan dengan mencapai puncak pada tahun 2018 dan selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019. Sedangkan usaha sarana pariwisata catering semenjak empat tahun mengalami penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 737 sedangkan pada tahun 2019 menjadi 9 usaha catering.





1.3 Gambaran Pemerintahan

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai potensi daerah.

Grafik 1.9

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung



Berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mengacu prinsip efektivitas dan efisiensi serta Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dibandingkan tahun 2016, jumlah Perangkat Daerah mengalami pengurangan dari 53 menjadi 38 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 7 badan, 21 Dinas, 6 kecamatan dan 1 (satu) RSUD.





Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019 sebanyak 877 jabatan struktural. Secara lengkap jumlah, tipe dan jumlah jabatan structural/eselon seperti tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
 Jumlah, Tipe dan Jumlah Jabatan Struktural
 Di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
1	Sekretariat Daerah;	A	1	6	12		36		55
2	Sekretariat DPRD;	B		1	3		9		13
3	Inspektorat;	A		1	5		3		9
4	Dinas Pariwisata;	A		1	1	4	15		21
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;	A		1	1	4	15		21
6	Dinas Kebudayaan;	A		1	1	4	15		21
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	A		1	1	8	27		37
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	A		1	1	5	18		25
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;	A		1	1	4	15		21
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;	A		1	1	4	15		21
11	Dinas Pertanian dan Pangan;	A		1	1	6	21		29
12	Dinas Komunikasi dan Informatika;	A		1	1	5	18		25
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	A		1	1	4	15		21
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	A		1	1	4	15		21
15	Satuan Polisi Pamong Praja;	A		1	1	4	15		21
16	Dinas Kesehatan;	A		1	1	4	15		21
17	Dinas Sosial;	B		1	1	3	11		16
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	B		1	1	5	17		24
19	Dinas Kependudukan dan	B		1	1	3	11		16





NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	Pencatatan Sipil;								
20	Dinas Perikanan;	B		1	1	3	11		16
21	Dinas Perhubungan;	B		1	1	3	11		16
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	B		1	1	3	11		16
23	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan; dan	B		1	1	3	11		16
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	B		1	1	3	11		16
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	A		1	1	4	15		21
26	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;	B		1	1	3	8		13
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	B		1	1	3	11		16
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan	C		1	1	2	6		10
29	Badan Penelitian dan Pengembangan;	C		1	1	2	8		12
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;			1		4	11		16
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;			1	1	3	9		14
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	C			1	4		8	13
33	Kecamatan Petang;	A			1	1	5	2	9
34	Kecamatan Abiansemal;	A			1	1	5	2	9
35	Kecamatan Mengwi;	A			1	1	5	2	9
36	Kecamatan Kuta Utara;	A			1	1	5	2	9
37	Kecamatan Kuta; dan	A			1	1	5	2	9
38	Kecamatan Kuta Selatan.	A			1	1	5	2	9
39	Kel. Kapal						1	4	5
40	Kel. Abianbase						1	4	5
41	Kel. Lukluk						1	4	5
42	Kel. Sading						1	4	5
43	Kel. Sempidi						1	4	5





NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
44	Kel. Kerobokan Kaja						1	4	5
45	Kel. Kerobokan						1	4	5
46	Kel. Kerobokan Kelod						1	4	5
47	Kel. Seminyak						1	4	5
48	Kel. Legian						1	4	5
49	Kel. Kuta						1	4	5
50	Kel. Tuban						1	4	5
51	Kel. Kedonganan						1	4	5
52	Kel. Benoa						1	4	5
53	Kel. Tanjung Benoa						1	4	5
54	Kel. Jimbaran						1	4	5
55	UPTD						55	55	110
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	TOTAL JUMLAH		1	36	54	117	530	139	877

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020





1.5 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Badung menurut perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 8.212 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara lengkap seperti berikut:

1.5.1. Distribusi Menurut Pendidikan

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan tercatat, tingkat pendidikan yang paling banyak sarjana strata 1 sebanyak 5.494 orang (54,72%) sedangkan yang paling kecil dengan tingkat pendidikan strata 3 (Doktor) sebanyak 2 orang (0,02%).

Tabel 1.4
Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan
di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1.	SD	52	22	74	0,90
2.	SLTP	135	40	175	2,13
3.	SLTA	1170	591	1761	21,44
4.	DIPLOMA I/II	90	97	187	2,28
5.	DIPLOMA III/IV	119	544	663	8,07
6.	S1	2024	2470	4494	54,72
7.	S2	461	395	856	10,42
8.	S3	2	0	2	0,02
	Jumlah	4053	4159	8212	100,00

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019

1.5.2. Distribusi Menurut Kepangkatan

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan tercatat, kepangkatan pegawai yang paling banyak golongan III/a sebanyak 1.250 orang (12,22%) sedangkan yang paling kecil dengan kepangkatan I/a dan IV/d sebanyak 2 orang (0,02%). Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan seperti table 1.5 berikut :





Tabel 1.5
 Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan
 di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	GOLONGAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	I/a	1	1	2	0,02
2	I/b	5	5	10	0,12
3	I/c	27	4	31	0,38
4	I/d	44	8	52	0,63
5	II/a	154	55	209	2,55
6	II/b	214	50	264	3,21
7	II/c	466	286	752	9,16
8	II/d	281	163	444	5,41
9	III/a	510	740	1250	15,22
10	III/b	505	674	1179	14,36
11	III/c	348	507	855	10,41
12	III/d	446	573	1019	12,41
13	IV/a	648	594	1242	15,12
14	IV/b	372	491	863	10,51
15	IV/c	30	8	38	0,46
16	IV/d	2	0	2	0,02
		4053	4159	8212	100,00

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019

1.5.3. Distribusi Menurut Eselon

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut eselon, tercatat pegawai dengan jabatan eselon yang paling banyak eselon IV sebanyak 645 orang (74,14%) sedangkan yang paling kecil dengan eselon V sebanyak 18 orang (2,07%). Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jabatan eselon seperti tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6
 Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan
 di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	ESELON	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1.	Eselon II	25	2	27	3,10
2.	Eselon III	136	44	180	20,69
3.	Eselon IV	392	253	645	74,14
4.	Eselon V	11	7	18	2,07
	Jumlah	564	306	870	100,00

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019





1.5.4. Distribusi Menurut Jenjang Jabatan

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan tercatat, jabatan yang paling banyak adalah fungsional umum/staf sebanyak 4.083 orang (49,72%) sedangkan yang paling kecil dengan jabatan struktural sebanyak 870 orang (10,59%).

Tabel 1.7

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut status jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	JABATAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1.	Struktural	564	306	870	10,59
2.	Fungsional Tertentu	1235	2024	3259	39,69
3.	Fungsional Umum/Staf	2254	1829	4083	49,72
	Jumlah	4053	4159	8212	100

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019





1.6 Sumber Daya Keuangan

Anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 6.328.881.287.941,05, dengan realisasi sebesar Rp. 5.792.967.591.407,56 atau sebesar 91,53%. PAD ditargetkan sebesar Rp. 5.312.501.110.743,56 terealisasi sebesar Rp. 4.835.188.460.096,80 atau sebesar 91,02%. PAD sebagian besar dari sektor pariwisata antara lain: sektor pajak hotel dan restoran. Sebagai gambaran pendapatan daerah seperti tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.8
 Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	6.328.881.287.941,05	5.792.967.591.407,56	91,53
	Pendapatan Asli Daerah	5.312.501.110.743,56	4.835.188.460.096,80	91,02
	Pendapatan Transfer	935.681.977.197,49	888.446.011.310,76	94,95
	Lain-lain Pendapatan yang sah	80.698.200.000,00	69.333.120.000,00	85,92
2	Belanja	5.392.006.019.799,60	4.663.810.754.155,97	86,49
	Belanja Operasi	4.514.443.278.513,55	3.828.736.709.179,50	84,81
	Belanja Modal	864.186.998.486,05	824.668.015.490,52	95,43
	Belanja Tak terduga	13.375.742.800,00	10.406.029.485,95	77,80
3	Pembiayaan Daerah			
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	221.406.310.542,79	221.594.843.868,00	100,08
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100
	Pembiayaan Netto	219.406.310.542,79	219.594.843.868,00	100,08

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Badung Tahun 2019 (unaudited)

Pendapatan asli daerah yang didukung dari pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang paling besar bagi pendapatan daerah sehingga Kabupaten Badung memiliki ruang fiskal yang sangat baik. Sebagai gambaran kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah seperti grafik berikut:





Grafik 1.10
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015-2019



Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kab.Badung, 2019



Isu Strategis

Beberapa permasalahan pokok (isu strategis) yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian yaitu :

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BADUNG



1. Meningkatkan Kerukunan dan Pelestarian Adat dan Budaya
2. Meningkatkan Pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan Kualitas SDM
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
6. Pembangunan Kepariwisata bersinergi dengan pertanian dan perikanan





Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah sesuai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan.
- b) Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
- c) Revitalisasi adat, dan karya seni.
- d) Restorasi warisan budaya daerah.
- e) Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya.
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.
- g) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima
- h) Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)
- i) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah Kebijakan :

- a) Mempercepat proses pelayanan publik yang prima (tepat, cepat, akurat) didukung teknologi informasi.
- b) Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- c) Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).
- d) Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi.

3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.

Arah Kebijakan :

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.





- b) Melakukan Evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c) Meningkatkan interprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung.
- d) Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah).
- e) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- f) Meningkatkan kualitas bantuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah.
- h) Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal.
- i) Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- j) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- k) Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan Bimtek/sejenisnya terhadap PNS.
- l) Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD.
- m) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

Arah Kebijakan :

- a) Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%.
- b) Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi.
- c) Memantapkan mutu pendidikan dasar mendukung wajar 12 tahun.
- d) Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu.
- e) Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif
- f) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu
- g) Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi.
- h) Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
- i) Pemenuhan kualitas gedung pendidikan.
- j) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- k) Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- l) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).
- m) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- n) Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.





- o) Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- p) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- q) Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- r) Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- s) Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- t) Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta perawatan kesehatan masyarakat.
- u) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- v) Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
- w) Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
- x) Peningkatan pelayanan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang.
- y) Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/perguruan tinggi.
- z) Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS.
- aa) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial.
- bb) Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
- cc) Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.

5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing.
- b) Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- b) Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM .
- c) Penegakan Hukum dan HAM.





- d) Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e) Meningkatkan kualitas hidup perempuan.

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan :

- a) Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan.
- c) Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan.
- d) Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah.
- e) Rehabiltasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam
- f) Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- g) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h) Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- i) Peningkatan sistem informasi lingkungan.
- j) Meningkatkan kualitas database lingkungan.
- k) Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan.
- l) Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- m) Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
- n) Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
- o) Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai.
- p) Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat.
- q) Penanganan pasca bencana yang komprehensif.
- r) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.

8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
- b) Melaksanakan akreditasi terhadap LPK.
- c) Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor.
- d) Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial (Perjanjian Kerja Sama).
- e) Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan
- f) Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri





- g) Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
- h) Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
- i) Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- j) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
- k) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- l) Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.

9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Arah Kebijakan :

- a) Mengintensifkan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
- b) Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah.
- c) Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah.
- d) Optimalisasi ketersediaan sumber daya air.
- e) Mempertahankan kesuburan tanah.
- f) Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.
- g) Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.
- h) Meningkatkan kesejahteraan petani
- i) Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.
- j) Membuka akses pemasaran hasil-hasil pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata
- k) Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- l) Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga.
- m) Pelestarian plasma nutfah tanaman langka.
- n) Mengembangkan Pertanian Organik.
- o) Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian.
- p) Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
- q) Memantapkan program Badung go organik .
- r) Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan.
- s) Peningkatan infratraktur pertanian.
- t) Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani.
- u) Menyusun regulasi tentang penampungan dan pemasaran hasil pertanian.
- v) Mengembangkan pariwisata alternatif





- w) Peningkatan kualitas DTW dan desa wisata sesuai standar kepariwisataan.
- x) Melaksanakan promosi pariwisata.
- y) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat.
- z) Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
- aa) Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian.



Ruang Lingkup

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif	Menyajikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Kabupaten Badung Tahun 2019.
Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, data umum yang menyangkut gambaran Kabupaten Badung, aspek strategis serta arah kebijakan.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menyajikan mengenai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2019.
Bab III Akuntabilitas Kinerja	Menyajikan capaian kinerja tahun 2019 yang memuat hasil pengukuran kinerja dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan
Bab IV Penutup	Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja tahun 2019 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.





BAB II PERENCANAAN KINERJA



Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

2.1

RPJMD Semesta Berencana 2016-2021

RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Badung dalam lima Tahun kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Badung sebagai berikut :

RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG 2016-2021

**VISI
MISI**

**MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG
BERLANDASKAN TRIHITA KARANA MENUJU MASYARAKAT
YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA**

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan
5. Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yg menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya





Tabel 2.1
 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD
 Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
Visi :			
“MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”			
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama			
1.	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama
		2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi			
2.	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Indeks kepuasan masyarakat
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government			
3.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	4. Katagori akuntabilitas kinerja kabupaten
		5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5. Opini BPK
		6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	6. Katagori penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan			
4.	Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7. Indeks pembangunan manusia
		8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8. Indek Kebahagiaan
		9. Menurunnya angka kemiskinan	9. Persentase penduduk miskin





NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan			
5.	Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	10. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10. Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
6.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	11. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	11. Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada
		12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12. Persentase penegakan Perda dan Perkada
7.	Terwujudnya Pengarasutamaan Gender	13. Meningkatnya Pengarasutamaan gender	13. Indeks pembangunan gender (PG)
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana			
8.	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14. Indek kualitas lingkungan hidup
			15. Indeks pertanian
9.	Terwujudnya Penanggulangan bencana secara terpadu	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah			
10.	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17. Tingkat pengangguran terbuka
11.	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya			
12.	Meningkatnya ketersediaan pangan	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19. Skor pola pangan harapan





NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
13.	Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor Pertanian dan Perikanan	19. Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20. Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing
		20. Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	21. Persentase kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD semesta berencana 2016-2021, telah ditetapkan 5 program prioritas daerah sebagai penjabaran **Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)** sebagai berikut:

Grafik 2.1.

Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021



Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta membangun akuntabilitas kinerja yang semakin baik, maka Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 telah dirumuskan secara terukur dan akuntabel. Untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Badung yang lebih fokus maka masing-masing indikator dibuatkan *cross cutting program*, seperti contoh berikut :





Grafik 2.2.

Cross Cutting Program Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021



Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator kinerja Utama maka setiap sasaran RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan pendekatan pohon kinerja.

Untuk mencapai target indikator sasaran pembangunan sesuai perencanaan RPJMD semesta berencana, dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah (isu strategis) maka tema pembangunan tahun 2019 :

“ PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI INOVASI PELAYANAN DASAR DAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN”.



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Ketua DPRD I Putu Parwata dan Camat Kuta Utara A.A. Ngurah Arimbawa saat Musrenbang RKPD 2019 di Kecamatan Kuta Utara (12/2/2018)





2.1

Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Perjanjian kinerja tahun 2019 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2016 – 2021, dan telah ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2019 sebagai berikut :





Tabel 2.2
 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1 Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	82,40
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2 Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	77
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	80
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4 Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78,00 (BB)
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5 Opini BPK	Nilai	WTP
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	BB
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7 Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,3
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8 Indek Kebahagiaan	Nilai	72,5
9	Menurunnya angka kemiskinan	9 Persentase penduduk miskin	%	2,15 -2,10
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,80
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11 Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	%	90
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12 Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	85
13	Meningkatnya pengarasutamaan gender	13 Indeks pembangunan gender (PG)	Nilai	75,87
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14 Indeks kualitas lingkungan hidup (KLH)	Nilai	67,94
		15 Indeks Pertanaman (IP)	Nilai	205
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17 Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,325
17	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	99,25
18	Meningkatnya produksi pangan harapan	19 Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,50
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20 Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	69
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,58





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Potret Pengukuran dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 13 tujuan, 20 sasaran dan 21 indikator kinerja utama (IKU). Untuk tahun 2019 terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yang belum dapat dilaporkan capaian kinerjanya yaitu Opini BPK dan Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kementerian PAN-RB karena data belum diumumkan dari instansi tersebut.

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2016-2021 memiliki *progress* yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih dipacu lagi karena memang mengalami dinamika permasalahan yang cukup tinggi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja utama (IKU). Untuk jelasnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung tahun 2019 sebagai berikut:





Tabel 3.1
 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	82,4	80,24	97,38
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	77	83	107,79
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	80	83,61	104,51
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4. Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78	77,9	99,87
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5. Opini BPK	Nilai	WTP	Belum Rilis BPK (WTP)	-
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6. Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	BB	BB (73,62)	100
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,3	81,59	100,36
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8. Indek Kebahagiaan	Nilai	72,5	76,14	105,02
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9. Persentase penduduk miskin	%	2,15-2,10%	1,78	115,24
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10. Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,80	8,01	102,69





NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11. Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	90	100	111,11
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12. Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	85	85,17	100,20
13.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	13. Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	75,87	94,68	124,79
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	67,94	70,077	103,15
		15. Indeks Pertanaman	Nilai	205	218,22	106,45
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100,00
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17. Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,325	0,306	105,85
17.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	99,25	100	100,76
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19. Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5	95,95	101,53
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20. Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	69,00	69,44	100,64
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,58	28,67	100,31
Rata-rata Kinerja Kabupaten						104,38





3.2

Analisis Capaian Kinerja

Analisis Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama

Membangun kerukunan umat beragama telah lama menjadi perhatian dan upaya pemerintah, karena hubungan antar umat beragama di Indonesia bukan saja sering memunculkan masalah tetapi juga telah menimbulkan konflik berkepanjangan. Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang paling dinamis dan heterogen dari perspektif agama, sosial-budaya-politik sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius tentang kerukunan umat beragama untuk menjaga wilayah Kabupaten Badung. Kerukunan Umat beragam di Kabupaten Badung menjadi perhatian yang serius sehingga menjadi salah satu indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

Kerukunan umat beragama dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006 adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai. Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai.

Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama diperoleh dari hasil penelitian Badan Litbang Kabupaten Badung yang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama Kabupaten Badung.

Untuk mengukur indeks Kerukunan Umat Beragama ada tiga indikator yang digunakan dalam riset ini yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kementerian Agama juga membuat kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama menjadi beberapa



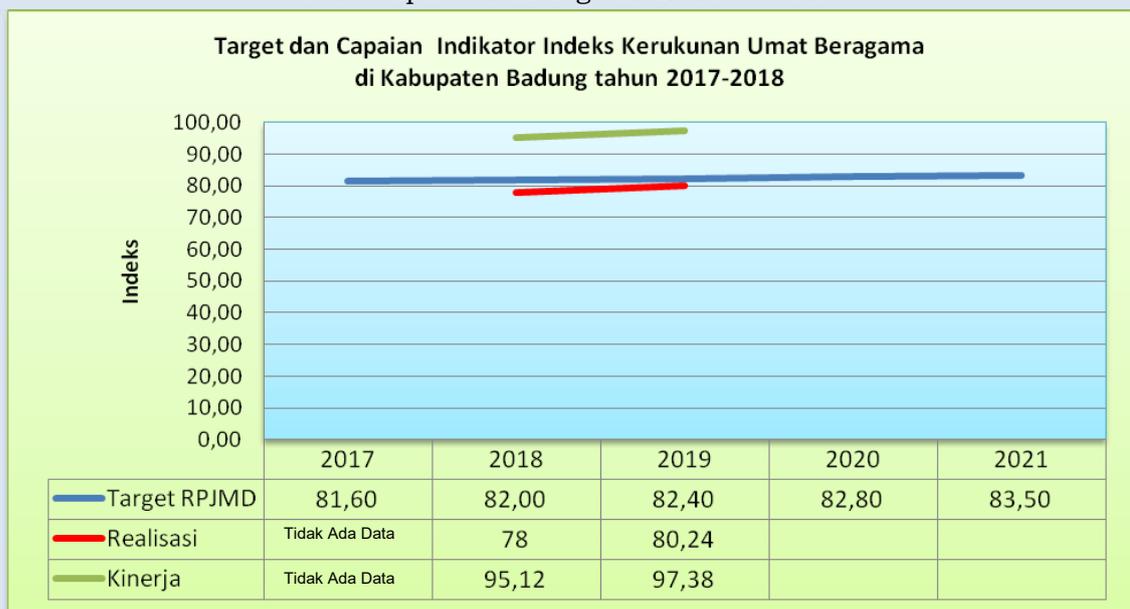


kategori nilai, yaitu : sangat tinggi (di atas 80), tinggi (antara 60-80), sedang (di bawah 60-40), dan rendah (40 ke bawah)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 sebesar 80,24 dari target yang ditetapkan sebesar 82,40 sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,38%. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi. Secara lengkap target dan capaian indikator indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung seperti pada grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1

Target dan Capaian Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Hasil capaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2018 dengan capaian sebesar 78 dari target yang ditetapkan sebesar 82 sehingga menunjukkan trend peningkatan sebesar 2,24 poin. Sedangkan untuk tahun 2017 tidak ada hasil capaian realisasi dan kinerja karena belum ada survei Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Hasil capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan bahwa capaian masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 83,50.

Hasil capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 73,83. Kategori Indeks Kerukunan





Umat Beragama Nasional termasuk tinggi. Secara lengkap perbandingan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama seperti grafik 3.2 berikut :

Grafik 3.2

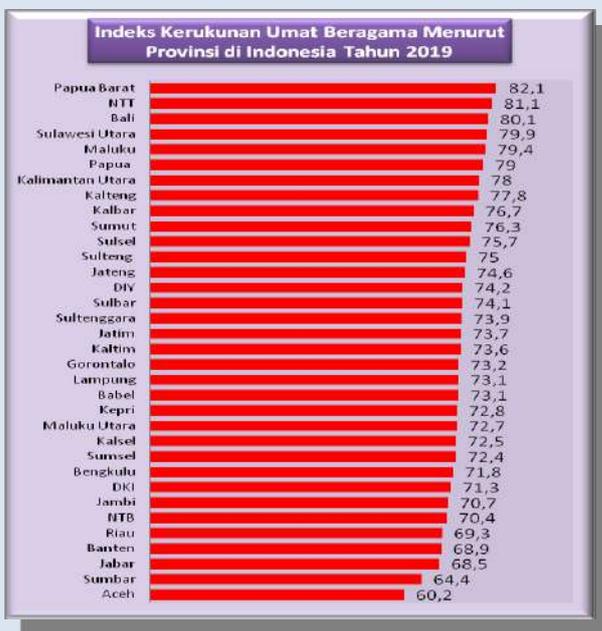
Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2017-2019



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Berdasarkan data Kementerian agama, indeks kerukunan umat beragama (KUB) di Indonesia tahun 2019 berada pada angka 73,83. Dari data indeks KUB

tersebut, diketahui pula bahwa provinsi dengan indeks toleransi tertinggi adalah Papua Barat yang mencapai angka 82,1 dan masuk kategori sangat tinggi. Provinsi Bali menduduki urutan ke 3 (tiga) dengan indeks kerukunan umat beragama sebesar 80,1. Sementara itu, Provinsi Aceh memperoleh nilai terendah di antara provinsi lain dengan nilai 60,2 (kategori KUB termasuk sedang).



Sebagai pembanding Indeks Kerukunan Umat beragama di Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian Agama diperoleh informasi bahwa indeks kerukunan



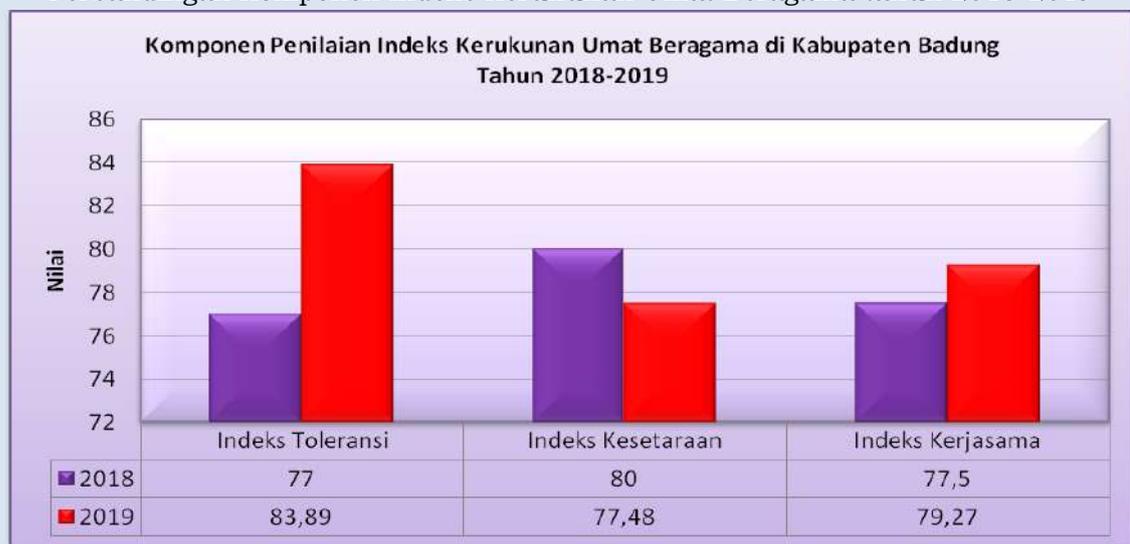


umat beragama tahun 2019 sebesar 73,83, tahun 2018 sebesar 70,90, tahun 2017 sebesar 72,27, tahun 2016 berada diangka 75.47, angka tersebut naik 0.11 % ketimbang Tahun 2015, yakni sebesar 75.36.

Tingkat kerukunan umat beragama (KUB) di Kabupaten Badung tahun 2019 terdiri atas dimensi Toleransi dengan nilai sebesar 83,89, Kesetaraan sebesar 77,48 dan Kerjasama sebesar 79,27, sehingga nilai rata-rata kerukunan umat beragama sebesar 80,24 yang berarti tingkat kerukunan umat beragama termasuk kategori sangat tinggi di Kabupaten Badung. Terciptanya kerukunan umat beragama yang tinggi di Kabupaten Badung tidak terlepas dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberagaman. Adanya rasa saling menghargai antar sesama umat beragama, peran serta tokoh agama dalam memberikan pemahaman bagi umatnya, serta tingginya sinergitas tokoh adat dan tokoh masyarakat antar agama yang menciptakan suatu kerukunan umat beragama. Secara lengkap perbandingan komponen indeks KUB di Kabupaten Badung seperti grafik 3.3 berikut:

Grafik 3.3

Perbandingan Komponen Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2018-2019



Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama sebanyak 4 program dengan 5 kegiatan. Program yang mendukung pencapaian target sasaran ini antara lain: program penguatan ideologi dan pengembangan pengawasan kebangsaan (wasbang), program kesatuan kebangsaan pendidikan politik masyarakat, program peningkatan penelitian dan pengembangan, program peningkatan kesejahteraan rakyat dan program pengembangan nilai budaya. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 921.603.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 902.766.600 sehingga penyerapannya sebesar 97,96%.





Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi meningkatnya indeks kerukunan umat beragama antara lain :

- 1) Peran tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat senantiasa membangun sinergisitas agar terbangun keharmonisan yang baik di lingkungan desa dan kelurahannya
- 2) Peran tokoh agama sebagai *opinion leader* terhadap umatnya sudah berjalan dengan baik sehingga kerawanan konflik yang akan muncul sangat rendah dan bahkan belum pernah muncul konflik tersebut.
- 3) Latar belakang pendidikan, wawasan dan pemahaman, serta tingkat intelektual yang baik menjadi nilai kekuatan pada aspek toleransi masyarakat Kabupaten Badung khususnya pada daerah yang heterogenitasnya tinggi.
- 4) Adanya rasa saling menghargai, menghormati sesama umat beragama atas dasar kesadaran pada diri masing-masing pemeluk agama di Kabupaten Badung.

Walaupun indeks KUB di Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi namun belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat kerukunan umat beragama antara lain :

- 1) Heterogenitas selain memiliki sisi positif juga memiliki sisi negatif, dimana tingginya heterogenitas di suatu wilayah tertentu akan sangat rentan terjadi konflik jika tidak disertai dengan sinergitas yang baik antar tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat dalam menjaga keharmonisan di lingkungannya.
- 2) Pemahaman agama secara universal belum maksimal terbangun, artinya masyarakat pemeluk agama hanya berpegang pada ajaran agamanya saja dalam bermasyarakat, serta pendidikan multikultural belum disosialisasikan secara merata kepada generasi muda.

Strategi yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kerukunan umat beragama yaitu Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan perannya dalam tri kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan KUB meliputi :

- 1) Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*.
- 2) Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan.





- 3) Membangun dan mengembangkan FGD dari tingkat Kabupaten sampai desa dan kelurahan, melaksanakan outing, dan jambore pada generasi muda lintas agama sehingga akan tumbuh pemahanan ajaran agama secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat
- 4) Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.



Gambaran Konsisi Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Badung

Analisis Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Pelestarian Adat dan Budaya

Di era globalisasi dewasa ini kebudayaan lokal (kearifan lokal) sangat dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang membawa dampak positif maupun negatif. Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan wisata, sehingga secara langsung akan beradapan dengan budaya asing. Demikian juga dengan perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak langsung terhadap eksistensi kebudayaan hindu yang berbasis budaya, adat dan agama.

Penetapan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya dengan indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diharapkan dapat menumbuhkan sinergitas antara pengembangan pariwisata berbasis budaya dengan pelestarian adat dan budaya masyarakat.





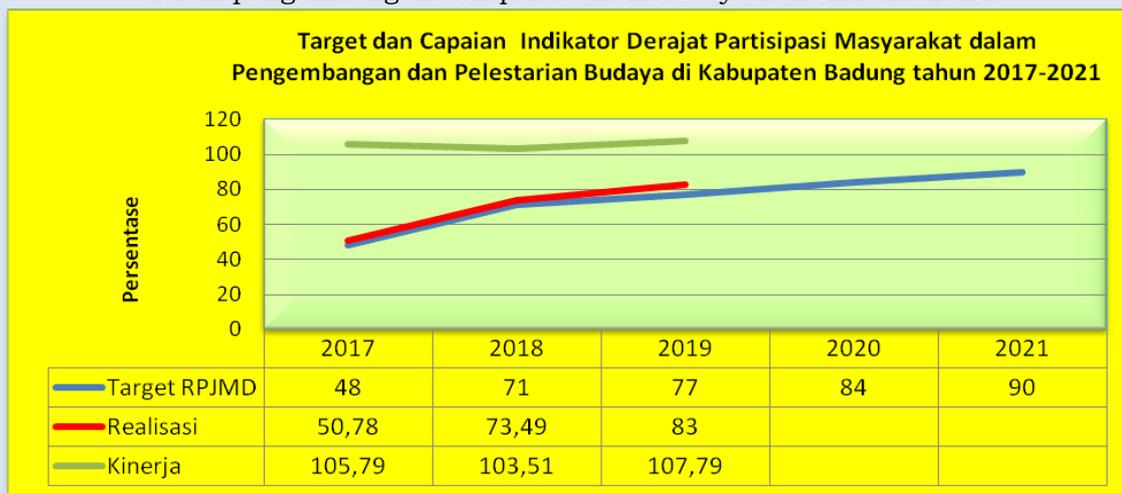
Indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diukur dengan formula Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2 (dua).

Hasil capaian indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tahun 2019 sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar 77% sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,79%. Hasil capaian tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan.

Hasil capaian pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 73,49% dari target 71 %, berarti capaian pada tahun 2019 telah melampaui hasil capaian sebelumnya. Sedangkan hasil capaian tahun 2019 masih dibawah target yang ditetapkan akhir RPJMD sebesar 90% namun tren capaian dari tahun 2017-2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sebagai perbandingan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kabupaten Badung seperti grafik 3.4 berikut:

Grafik 3.4

Perbandingan target dan Realisasi Indikator Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Tahun 2017-2021



Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun 2019

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya ditinjau dari kategori tingkat kemajuan desa adat menunjukkan bahwa semua desa adat (122 desa adat) di Kabupaten Badung termasuk kategori desa adat maju.

Sedangkan berdasarkan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung menunjukkan dari 61 cagar budaya yang ada semuanya dalam kategori lestari. Secara Kategori desa adat dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung seperti tabel 3.2 berikut :





Tabel 3.2
 Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA ADAT	JML DESA ADAT		%	JUMLAH CAGAR BUDAYA	JML. CAGAR BUDAYA LESTARI	%
			BERKEM BANG	MAJU				
1	Petang	27	-	27	100	22	22	100
2	Abiansemal	34	-	34	100	7	7	100
3	Mengwi	38	-	38	100	16	16	100
4	Kuta Utara	8	-	8	100	4	4	100
5	Kuta	6	-	6	100	-	-	100
6	Kuta Selatan	9	-	9	100	12	12	100
	Kabupaten	122	-	122	100	61	61	100

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2019

Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Dalam organisasi subak, dikenal adanya beberapa perangkat. Perangkat-perangkat yang ada dalam subak adalah pekaseh (ketua subak), petajuh (wakil pekaseh), penyarikan (juru tulis), petengen (juru raksa), kasinoman (kurir), dan beberapa yang lainnya. Subak merupakan salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO.

Keberadaan subak di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa seluruhnya termasuk dalam kategori lestari atau dari 214 kelompok tani semuanya (100%) lestari. Sedangkan menurut komponen jumlah sekaa/kelompok tari, tabuh dan Kidung/Kekawin telah mendapatkan pembinaan, dari 2280 sekaa/kelompok yang aktif sebanyak 1505 sekaa atau 66%. Secara Lengkap jumlah subak dan sekaa/kelompok seni menurut kecamatan di Kabupaten Badung, seperti tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
 Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang
 di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUBAK	JUMLAH SUBAK LESTARI	JUMLAH SEKAA YANG ADA			JUMLAH SEKAA YANG BERKEMBANG		
				TARI	TABUH	KIDUNG	TARI	TABUH	KIDUNG
1	Petang	43	43	81	97	13	42	53	13
2	Abiansemal	53	53	157	228	89	59	115	51
3	Mengwi	70	70	127	473	285	62	245	235
4	Kuta Utara	18	18	136	175	35	73	175	35
5	Kuta	3	3	9	86	18	5	86	18
6	Kuta Selatan	27	27	58	173	40	25	173	40
	Kabupaten	214	214	568	1232	480	266	847	392

Sumber Data : Bapenda dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2019





Pembangunan Gedung Budaya untuk pencapaian sasaran strategis infrastruktur wilayah yang berkualitas serta meningkatnya pelestarian adat dan budaya

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya didukung oleh 5 program dan 43 kegiatan. Program pendukung meliputi: program pengembangan nilai budaya, dan program pengelolaan kekayaan budaya dan Program Pengelolaan kekayaan budaya. Kegiatan yang dilaksanakan seperti pembinaan lembaga adat (desa adat, sekaa teruna, subak dan kelompok-kelompok kesenian). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 206.403.401.812,- dengan realisasi sebesar Rp. 175.906.119.032 dengan serapan anggaran sebesar 85,22%.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dalam pencapaian target indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya adalah meningkatnya eksistensi adat masyarakat, menguatnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat, dan meningkatnya pelestarian seni dan warisan budaya melakukan inventarisasi serta sosialisasi terhadap situs budaya daerah serta pelestarian warisan budaya daerah

Strategi yang akan dilaksanakan untuk terus meningkatkan indikator ini adalah mengidentifikasi dan mendata secara akurat cagar budaya dan sekaa kesenian yang ada, meningkatkan pembinaan serta perlindungan dari aspek legal dalam pengelolaan pelestarian budaya, pemberian bantuan anggaran untuk pemeliharaan/perawatan warisan budaya.

Beberapa momentum yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah melalui kegiatan pembinaan kelompok (sekaa) tari, sekaa tabuh, sekaa kidung, festival budaya, pesta kesenian bali, festival budaya pertanian serta festival budaya bahari sebagai media untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya serta sebagai daya tarik wisata.





Analisis Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu evaluasi implementasi pelayanan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat (SKM).

Indeks kepuasan masyarakat dihitung dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Unsur Survei Kepuasan Masyarakat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi: 1) persyaratan 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6) Kompetensi pelaksana 7) Perilaku pelaksana 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan 9) Sarana dan Prasarana. Berdasarkan kesembilan unsur maka diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat seperti tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik





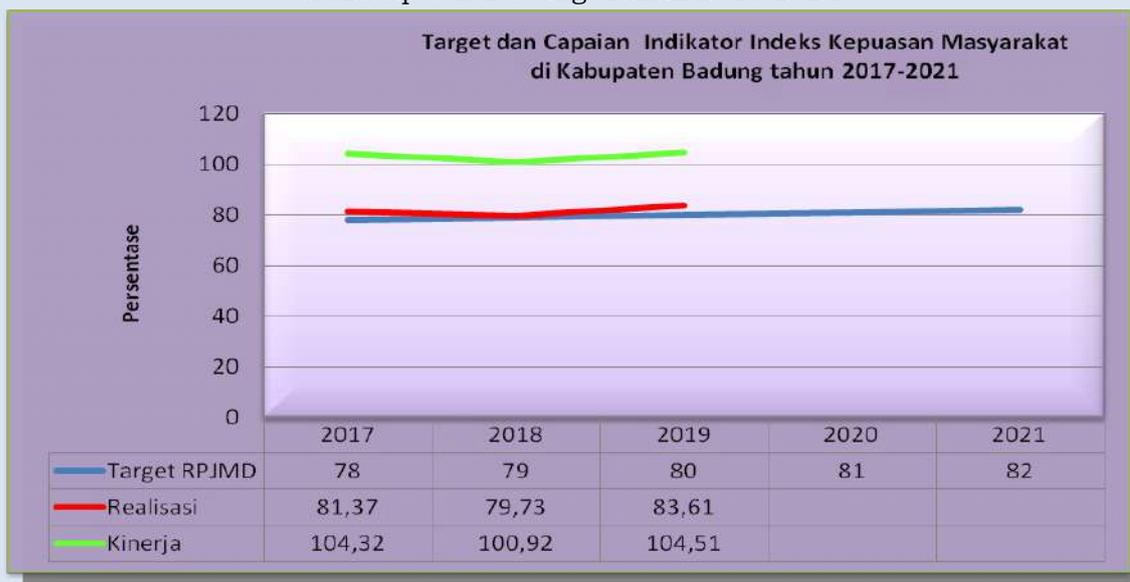
Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan indikator hasil survei kepuasan masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diharapkan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai standar yang cepat, mudah, murah, nyaman dan ramah sebagai wujud pelayanan prima.

Hasil capaian indikator indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 sebesar 83,61 dari target yang ditetapkan sebesar 80 sehingga kinerjanya sebesar 104,51%, berarti capaian pada tahun 2019 telah melampaui target dan indeks kepuasan masyarakat kategori baik. Capaian target tahun 2019 lebih baik, bila dibandingkan dengan tahun 2018 dengan capaian sebesar 79,73 dengan predikat baik.

Hasil capaian tahun 2019 telah melampaui dari target yang ditetapkan akhir RPJMD sebesar 82, namun trend capaian dari tahun 2017-2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Secara lengkap perbandingan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung seperti grafik 3.5 berikut:

Grafik 3.5

Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2019

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung tahun 2015-2019 berdasarkan perangkat daerah menunjukkan bahwa perangkat daerah lebih banyak termasuk kategori baik dan tidak pernah ada perangkat daerah dengan kategori





kurang baik atau tidak baik. Secara lengkap kategori indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah sebagai berikut:

Grafik 3.6

Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2019

Penilaian indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Kabupaten Badung sebagai *role model* pelayanan publik Nasional tahun 2019.



Bupati Badung Menerima Penghargaan role model pelayanan publik Nasional





Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Balitbang Kabupaten Badung dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah. Perangkat daerah dengan indeks kepuasan masyarakat paling tinggi dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 92,17 sedangkan yang paling rendah dicapai oleh Kecamatan Kuta Selatan dengan capaian sebesar 77,85. Secara lengkap nilai indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah seperti grafik 3.7 berikut:

Grafik 3.7

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2019



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2019

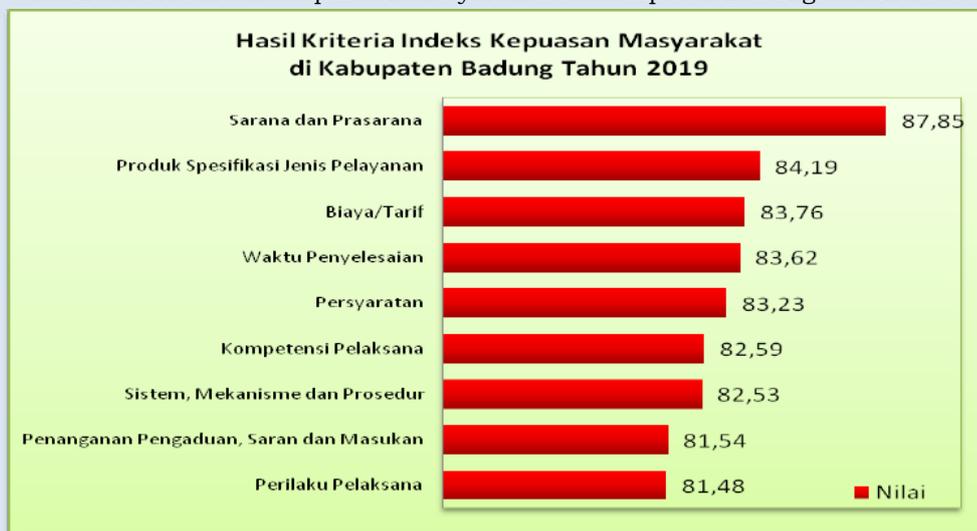
Berdasarkan unsur kepuasan masyarakat, diperoleh informasi bahwa dari sembilan unsur maka unsur yang paling tinggi nilainya adalah sarana dan prasarana





sebesar 87,85% dan yang terendah nilainya adalah perilaku pelaksana sebesar 81,48. Secara lengkap capaian unsur kepuasan masyarakat sebagai berikut :

Grafik 3.8
Hasil Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2019



Program inovatif dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung secara nyata dilapangan, mendapat apresiasi positif dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui sasaran ini diharapkan mampu mendorong seluruh OPD untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan berbagai program inovatif dalam pelayanan publik. Upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi bekerjasama dengan ORI dan akademisi Perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan

kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memperkuat kualitas SDM pelayanan publik. Disamping itu pula, tahun 2019 Kabupaten Badung meraih penghargaan inovasi pelayanan publik dari Menteri



Inovasi dari DLHK (BATIK) dan Bappeda Litbang Kabupaten Badung (Aplikasi Go Fish)





Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan masuk Top 99 dan Top 45. dari 3.400 inovasi terbaik Nasional tahun 2019 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan dua inovasi terbaik Badung yaitu **Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Berbasis Kearifan Lokal** dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan inovasi **Aplikasi FishGo** dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mendapat penghargaan TOP 99 kemudian berlanjut meraih penghargaan TOP 45 serta berhak mewakili Indonesia di *United Nations Public Service Awards (UNPSA)* tahun 2020.



Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Penghargaan TOP 45 kepada Bupati Badung di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Selasa (15/10)

Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk program penelitian dan pengembangan dengan kegiatan survei kepuasan masyarakat serta masing-masing perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran, Rumah Sakit, sekolah, puskesmas serta didukung penyediaan peralatan yang semakin modern untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik didukung oleh 9 program dan 16 kegiatan. Program





pendukung meliputi: program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa kegiatan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SOP) dan Proses bisnis, Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik sampai ke tingkat desa upaya tersebut diperkuat dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kegiatan yang dilaksanakan seperti pembinaan lembaga adat (desa adat, sekaa teruna, subak dan kelompok-kelompok kesenian). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9.659.695.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.929.551.300,- dengan serapan anggaran sebesar 19,98%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena penundaan/rasionalisasi Pengadaan Tanah Untuk Taman Bacaan di Kabupaten Badung dengan anggaran sebesar Rp. 7.669.992.000,-

Selanjutnya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat maka langkah-langkah perbaikan kedepan meliputi :

- 1) Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima), untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
- 2) Mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas
 - b. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan
 - c. memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas
- 4) Meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelangganserta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi, telepon, SMS center, Email, dan atau penempatan Kotak Saran.
- 5) Melakukan survei secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.





Analisis Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja predikat/kategori Akuntabilitas Kinerja (AKIP) guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil perlu terus ditingkatkan. Berbagai upaya perbaikan kinerja guna mendukung sistem akuntabilitas kinerja melalui Revisi RPJMD, penyempurnaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan penyelarasan dokumen perencanaan serta *refocusing* program melalui *cross cutting* program telah menunjukkan peningkatan kualitas AKIP di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan akuntabilitas yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB nilai SAKIP Kabupaten Badung tahun 2019 sebesar 77,90 termasuk kategori kinerja sangat baik. Hasil capaian kinerja pada tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan RPJMD sebesar 78, namun telah mencapai target sesuai kategori BB (sangat Baik).

Hasil capaian indikator kinerja AKIP tahun 2019 lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2018 sebesar 77,85. Sedangkan hasil capaian indikator kinerja AKIP tahun 2019 masih dibawah target akhir RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 yang ditargetkan sebesar 80,10 (A). Secara lengkap hasil capaian nilai laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Badung tahun 2017-2021 seperti grafik 3.9 berikut :

Grafik 3.9

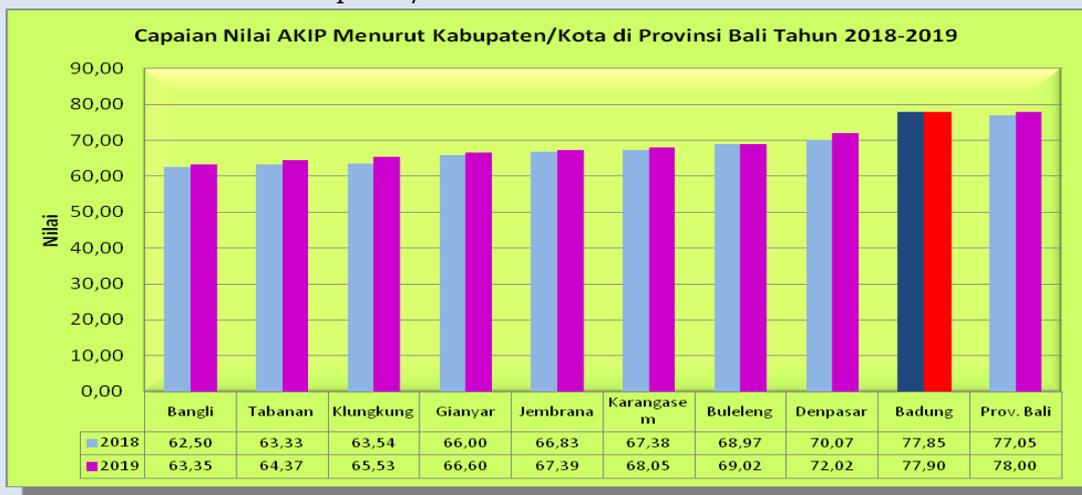
Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021





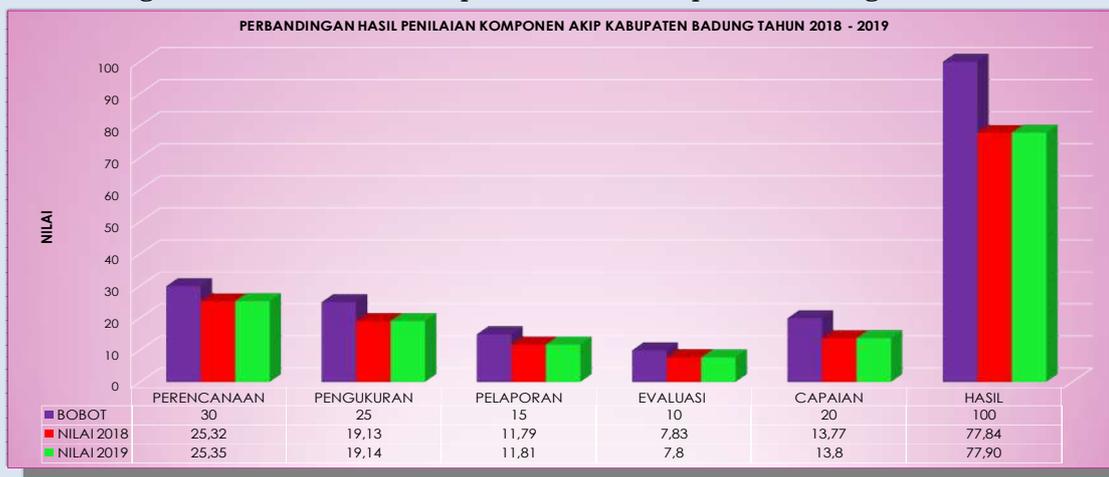
Hasil capaian nilai AKIP Kabupaten Badung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali menunjukkan nilai AKIP tertinggi. nilai AKIP Provinsi Bali dibandingkan dengan nilai AKIP Kabupaten Badung menunjukkan nilai AKIP Provinsi Bali lebih tinggi 0,10 poin. Perbandingan nilai AKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat seperti grafik 3.10 berikut :

Grafik 3.10
 Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2019



Sedangkan menurut 5 (lima) komponen penilaian AKIP diperoleh informasi bahwa hasil penilaian untuk evaluasi internal mengalami penurunan, sedangkan 4 komponen lainnya mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut kecil.

Grafik 3.11
 Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Kabupaten BADUNG Tahun 2018-2019





Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten didukung oleh 6 program dan 23 kegiatan. Program pendukung meliputi: program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur, Perencanaan dan Penganggaran SKPD, Program Peningkatan Kapasitas pelayanan publik dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.018.274.427,- dengan realiasi sebesar Rp. 4.492.179.517,- dengan serapan anggaran sebesar 89,52%.



Kementerian PAN-RB menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Wakil Bupati Badung di Nusa Dua Bali pada Senin, 27 Januari 2020.

Faktor pendorong terhadap pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten antara lain: Adanya komitmen Pimpinan kepala daerah untuk meningkatkan SAKIP, Adanya Tim SAKIP kabupaten yang memberikan bimbingan SAKIP ke perangkat daerah, Dukungan anggaran untuk implementasi kegiatan.

Faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi SAKIP antara lain: komitmen beberapa pimpinan OPD masih belum optimal, perubahan aturan pada perencanaan dan keuangan, implementasi pohon kinerja kedalam dokumen anggaran belum dapat dilakukan, evaluasi internal kinerja oleh OPD belum optimal, dan belum optimalnya tindak lanjut OPD terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat.





Strategi dan upaya untuk lebih meningkatkan nilai SAKIP antara lain: revisi pedoman pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Badung melalui penyusunan peraturan bupati tentang implementasi SAKIP dan pedoman pelaksanaannya, pembinaan/bimtek SAKIP kepada kepala perangkat daerah, pelaksanaan evaluasi internal capaian kinerja.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengimplementasikan SAKIP menjadi budaya kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja serta secara bertahap mengubah mindset ASN agar lebih berorientasi kinerja melalui upaya penyelarasan program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran RPJMD. Melalui penerapan Pohon Kinerja dan *refocusing program* mampu mencegah *inefisiensi* anggaran dan kini telah dirasakan manfaatnya dengan adanya perubahan *mindset* dalam perencanaan dan penganggaran serta adanya efisiensi anggaran. Dengan adanya efisiensi program/kegiatan akan berdampak terhadap efisiensi anggaran.

Dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung maka berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran. Efisiensi anggaran pada tahun 2019 sebesar 1,6 triliun, tahun 2018 sebanyak Rp. 776.032.414.731,96,- sedangkan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 133.232.647.500,-. Sedangkan efektivitas program dan kegiatan pada tahun 2018 sebanyak 240 program sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 218 program. Efektivitas dan efisiensi dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung seperti grafik 3.12 berikut :

Grafik 3.12

Perbandingan efisiensi Anggaran dan Program/Kegiatan dengan Penerapan SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2017-2019



Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2019





Analisis Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Barang Milik Daerah

Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah diukur dengan indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, dilakukan berbagai upaya melalui penyajian laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik mulai dari perencanaan sampai penatausahaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dapat menyajikan data dan informasi nilai asset yang sebenarnya sesuai jenis-jenis asset, jumlah, keberadaan dan kondisinya.

Dengan komitmen dan upaya tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Badung telah empat kali berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Kabupaten Badung pada tahun 2017 - 2018 telah berhasil mempertahankan opini WTP sesuai dengan target yang ditetapkan. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) berarti opini audit terhadap laporan keuangan yang diterbitkan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung oleh auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Sedangkan untuk tahun 2019 diharapkan mampu mempertahankan WTP sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun hasilnya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 saat ini masih dalam proses audit sehingga capaian kinerja sasaran ini tahun 2019 masih menunggu pengumuman resmi dari BPK RI.

Hasil capaian indikator kinerja opini BPK dari tahun 2017 sampai 2018 seperti grafik berikut:





Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menerima penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dari Kementerian Keuangan RI di Puspem Badung.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah didukung oleh 5 program dan 6 kegiatan. Program pendukung meliputi: program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program peningkatan dan pengembangan aset daerah dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 609.693.537,- dengan realisasi sebesar Rp. 474.192.913,- dengan serapan anggaran sebesar 77,78%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini dengan indikator opini BPK terhadap laporan keuangan daerah antara lain : penerapan pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP), rekonsiliasi aset barang milik daerah, pembinaan aset serta monitoring dan evaluasi keuangan dan aset BMD.

Analisis Kinerja Sasaran 6 : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Dan Bebas KKN

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk melaksanakan program reformasi birokrasi melalui percepatan 8 area perubahan RB dengan menetapkan sasaran terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN dengan indikator kategori Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.





PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit** (*Enablers*) dan **Hasil** (Results). *Pengungkit* adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan *Hasil* adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

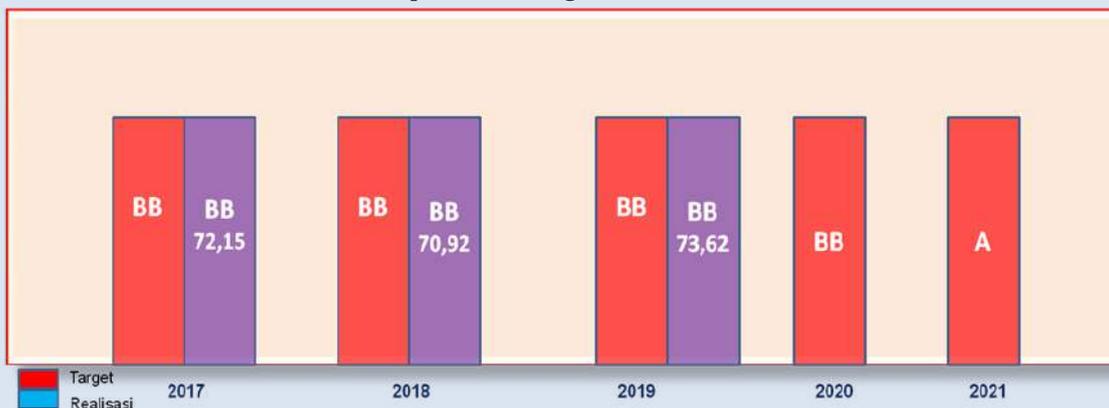
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah membuat kategori hasil evaluasi seperti berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN dengan indikator Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks PMPRB) pada tahun 2017 ditargetkan B dengan nilai (65.50) dan hasilnya Badung berhasil meraih predikat BB dengan nilai 72,15. Selanjutnya tahun 2018, indeks PMPRB ditargetkan dengan kategori BB dan realisasi BB (70,92). Indeks PMPRB tahun 2019 ditargetkan kategori BB dengan realisasi BB (73,62) sehingga kinerjanya sebesar 100%.

Grafik 3.13

Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks PMPRB) Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

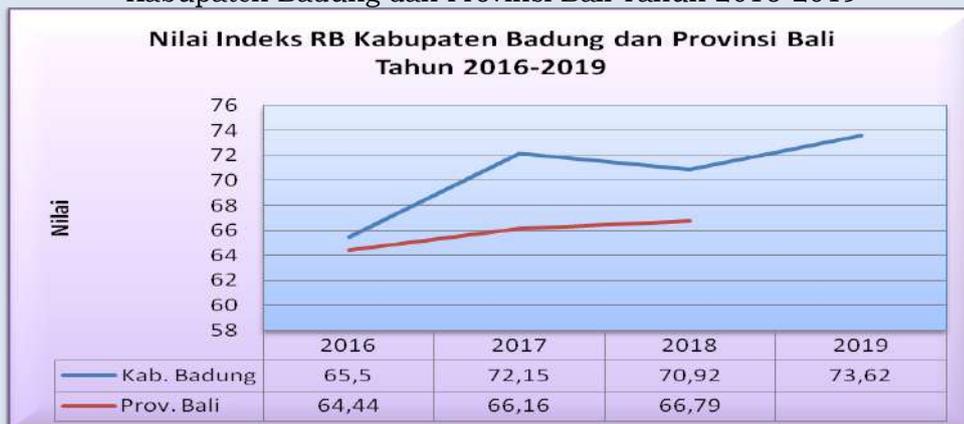




Hasil capaian indikator Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks PMPRB) tahun 2019 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target Akhir RPJMD semesta berencana 2016-2021 dengan kategori A, namun capaian indikator per tahun telah sesuai dengan target kategori BB.

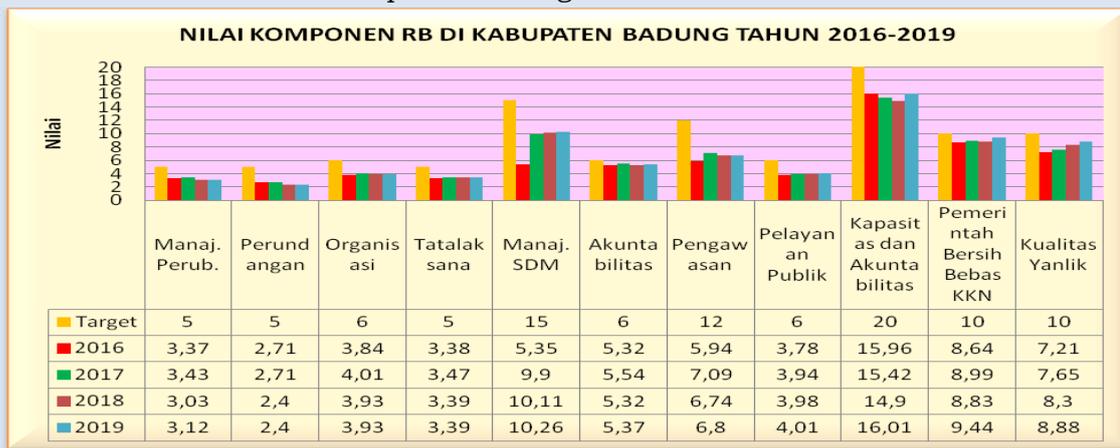
Hasil capaian indikator Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks PMPRB) Kabupaten Badung lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Bali untuk tahun 2018 sebesar 67,79.

Grafik 3.14
 Perbandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
 Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2016-2019



Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan 2 komponen yaitu komponen pengungkit dan hasil. Hasil secara lengkap terhadap evaluasi reformasi birokrasi komponen pengungkit dan hasil Kabupaten Badung Tahun 2016-2019 seperti grafik 3.15 berikut :

Grafik 3.15
 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit dan Hasil
 Kabupaten Badung Tahun 2016-2019





Hasil Penilaian komponen penguangkit pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB tahun 2019 diperoleh informasi bahwa dari 8 (delapan) area perubahan terdapat 5 (lima) area perubahan yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu komponen manajemen perubahan, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, sedangkan tiga area perubahan lainnya nilainya sama (tetap) sepoerti tahun 2018.

Sedangkan hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dari komponen hasil diperoleh informasi, dari tiga unsur yang dinilai semua komponen nilainya meningkat dibandingkan dengan 2018. Dari hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun 2019 mengalami peningkatan baik untuk komponen penguangkit maupun komponen hasil.

Upaya untuk mewujudkan sasaran terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN didukung oleh 9 program dan 25 kegiatan. Program pendukung meliputi: program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.786.227.510,- dengan realiasi sebesar Rp. 7.127.280.621,- dengan serapan anggaran sebesar 91,54%.



Bupati Badung Menenerima Penghargaan dari KPK terhadap pelaporan LHKPN dan gratifikasi





Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN antara lain: penguatan komitmen pimpinan, adanya tim pengarah dan pelaksana RB kabupaten, adanya Tim internal RB perangkat daerah, penguatan implementasi terhadap 8 area perubahan.

Faktor yang menjadi kendala antara lain: belum ada pemahaman yang sama tim RB internal OPD terhadap pelaksanaan rencana kerja RB, minimnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi.

Upaya yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan RB antara lain melalui perubahan *mindset* dan gerakan revolusi mental ASN, penancangan ZI, Penetapan WBK/WBBM, pelaksanaan seleksi terbuka JPT, seleksi CPNS melalui CAT, penguatan APIP, Penerapan SAKIP, penandatanganan fakta Integritas oleh seluruh ASN dan pembentukan MPP.

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan RB diantaranya melalui pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana RB, Penyusunan *Road Map* RB 2019 – 2021, penetapan zona integritas, Penyusunan Budaya Kerja, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.



Analisis Kinerja Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai



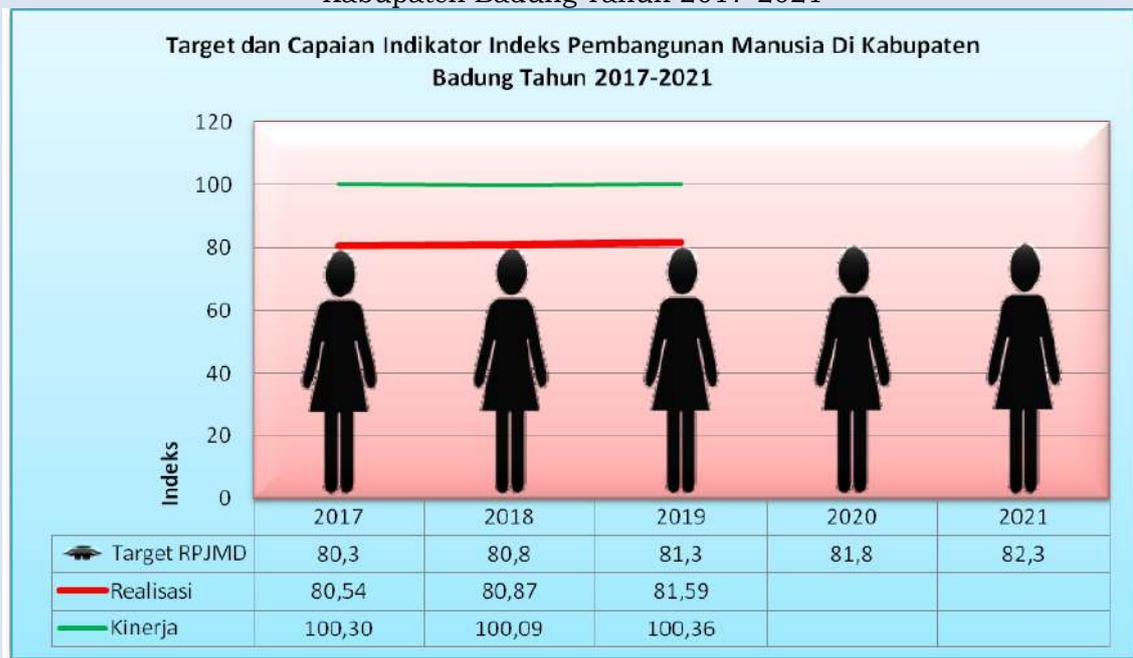


pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Kategori nilai indeks pembangunan manusia di bagi menjadi 4 antara lain:

- a. Sangat tinggi : IPM >80
- b. Tinggi : 70≤IPM<80
- c. Sedang : 60≤IPM<70
- d. Rendah : IPM <60

Hasil capaian sasaran strategis RPJMD meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti grafik 3.16 berikut:

Tabel 3.16
 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Hasil capaian indikator IPM Kabupaten Badung Tahun 2019 sebesar 81,59 dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 81,3 berarti capaian kinerja sebesar 100,36%. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung tahun 2019 termasuk kategori sangat tinggi.

Hasil capaian indikator IPM tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 81,3 dan tahun sebelumnya. Capaian IPM tahun 2019 masih dibawah target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD semesta berencana sebesar 82,3 namun menunjukkan trend peningkatan capaian.





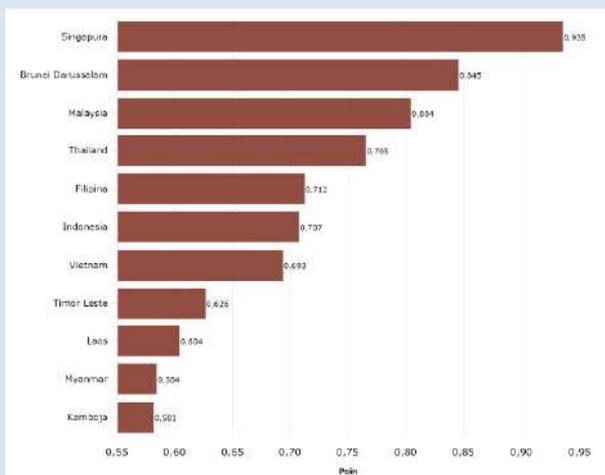
Hasil capaian IPM Kabupaten Badung bila dibandingkan dengan hasil capaian Kabupaten/Kota se Bali, menunjukkan bahwa capaian IPM Kabupaten Badung menduduki peringkat kedua setelah Kota Denpasar. IPM Kabupaten Badung diatas nilai IPM Provinsi Bali dan Nasional. Demikian pula hasil capaian IPM Kabupaten Badung lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Bali dan angka Nasional. Demikian juga telah melampaui capaian IPM beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Jawa Barat (Kota Bandung).

Tabel 3.17
 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2019



Sumber Data : BPS Pusat Tahun 2020

Hasil capaian indikator IPM Kabupaten Badung jika dibandingkan dengan



Negara asia tenggara berdasarkan data *United Nations Development Programme* (UNDP), 9 Desember 2019 berada diatas Negara Malaysia dengan IPM 80,4 jika dibandingkan dengan Kabupaten Badung dengan capaian 81,59.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pencapaian indikator IPM tidak terlepas dari upaya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program untuk meningkatkan komponen indeks pembangunan manusia.





Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia didukung oleh 12 program dan 48 kegiatan. Program pendukung meliputi:

1. Program untuk meningkatkan umur harapan hidup, meliputi :
 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
 - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - Program upaya kesehatan masyarakat
 - Program perbaikan gizi
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
2. Program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meliputi :
 - Program pendidikan anak usia dini
 - Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - Program pendidikan non formal
 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3. Program untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meliputi :
 - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebesar Rp. 349.019.617.579,- dengan realisasi sebesar Rp. 336.324.504.018,8,- dengan serapan anggaran sebesar 96,36%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia antara lain: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan rumah sakit, pelayanan kesehatan yang ditanggung pemerintah untuk semua penduduk, peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan ruang kelas belajar, pendidikan formal dan non formal paket A,B dan C serta peningkatan kesempatan kerja pada sektor pertanian dan pariwisata.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dari aspek kesehatan melalui: peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pendirian puskesmas dan rumah sakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak. Untuk peningkatan pendidikan melalui peningkatan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan luar sekolah. Strategi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan meminimalisir *drop out* peserta didik (dasar dan menengah) serta meningkatkan pendidikan luar sekolah dengan program kejar paket A, B dan C. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan penunjang pariwisata, infrastruktur, pertanian hortikultura, perikanan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga berdampak terhadap penghasilan atau daya beli masyarakat.





Analisis Kinerja Sasaran 8 : Meningkatnya Tingkat Kebahagiaan Masyarakat

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi yaitu : kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*Affect*) dan makna hidup (*Eudaimonia*) dengan skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya semakin rendah nilai indeks, maka penduduk semakin tidak bahagia. Beberapa variabel utama, dalam menentukan Indeks Kebahagiaan antara lain : Kepuasan terhadap kondisi kesehatan, Kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, Kepuasan terhadap pekerjaan, Kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga, Kepuasan terhadap kondisi keamanan, Kepuasan terhadap hubungan sosial, Kepuasan terhadap ketersediaan waktu luang, Kepuasan terhadap kondisi rumah, Kebahagiaan hidup, Harapan/keinginan yang sudah tercapai, Kepuasan hidup, Kepuasan terhadap kondisi lingkungan, Kepuasan terhadap keharmonisan keluarga.

Sasaran strategis RPJMD meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat diukur dengan indikator indeks kebahagiaan. Hasil capaian indikator indeks kebahagiaan pada tahun 2019 sebesar 76,14 dari target RPJMD yang ditetapkan sebesar 72,5 berarti capaian kinerjanya sebesar 105,02%. Secara lengkap target dan capaian indikator indeks kebahagiaan Kabupaten Badung seperti grafik 3.18 berikut:

Grafik 3.18

Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Hasil capaian indikator indeks kebahagiaan tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 75,47. Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 mencapai angka 76,14, meningkat 0,67 poin dibandingkan





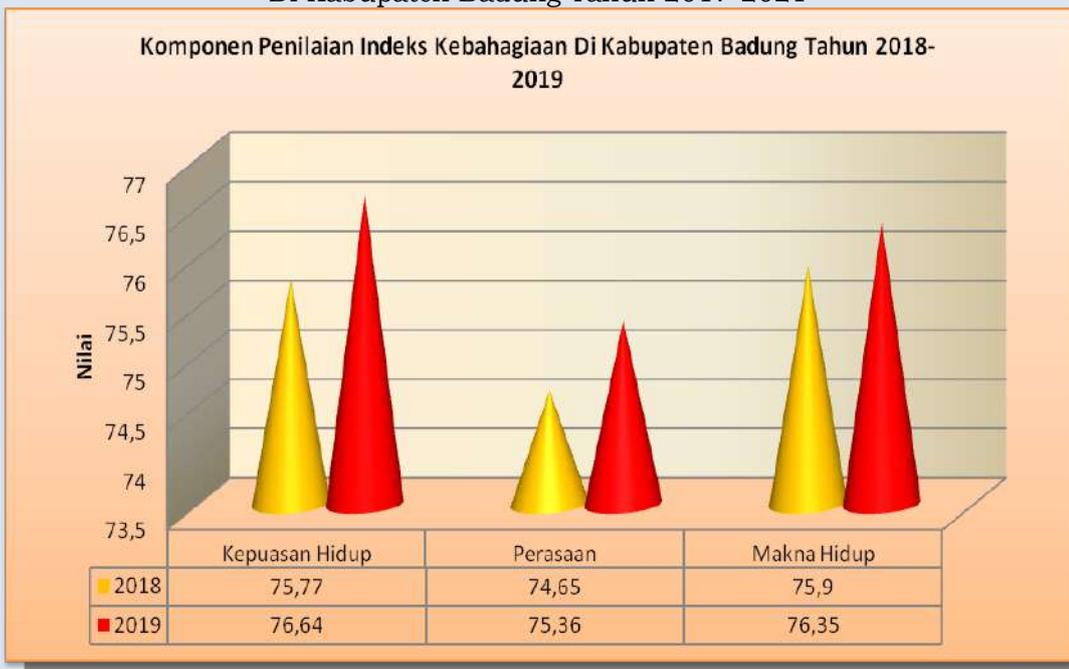
tahun 2018 yaitu sebesar 75,47. Demikian juga capaian indikator tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD semesta berencana tahun 2016-2021 dengan target 74,50. Sedangkan capaian indeks kebahagiaan Kabupaten Badung lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian indikator kebahagiaan Provinsi Bali sebesar 72,48 (data indeks kebahagiaan tahun 2017).

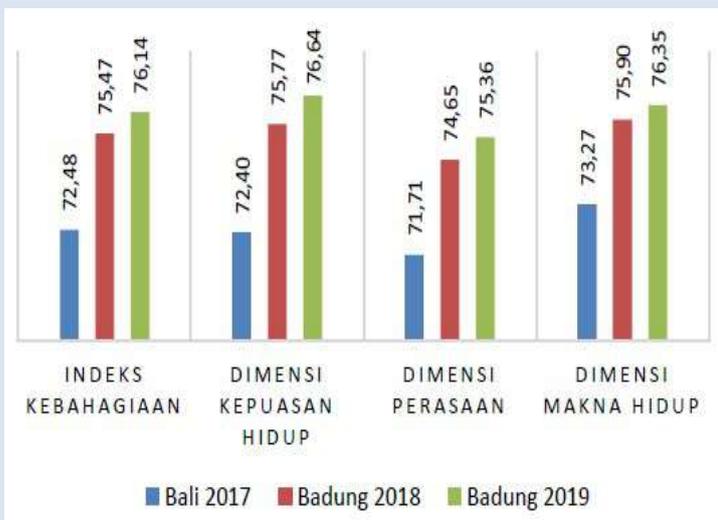
Pencapaian Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali yang berada pada nilai indeks 72,48 pada tahun 2017. Bahkan dari 3 (tiga) dimensi untuk mengukur Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung menunjukkan skala yang lebih tinggi dibandingkan capaian di tingkat Provinsi Bali. Sedangkan indeks kebahagiaan Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Kebahagiaan penduduk Indonesia tahun 2017 sebesar 69,51 pada skala 0 sampai 100.

Jika dilihat menurut dimensi/komponen indeks kebahagiaan, masyarakat Kabupaten Badung memiliki skala indeks yang paling tinggi sebesar 76,64 pada dimensi kepuasan hidup, meningkat 0,87 poin dari tahun 2018 yaitu sebesar 75,77. Selanjutnya dimensi makna hidup mencapai indeks sebesar 76,36, lebih tinggi 0,46 poin dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 75,90. Terakhir dari dimensi perasaan sebesar 75,36, juga meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar 74,64.

Grafik 3.19

Perbandingan Hasil penilaian Indikator Indeks Kebahagiaan menurut komponen Di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021





Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 diperoleh hasil indeks dalam dimensi kepuasan hidup. Dimensi kepuasan hidup atau yang disebut dimensi *life satisfaction* merupakan dimensi yang menggambarkan bahwa kepuasan hidup akan timbul dan dialami apabila kebutuhan dan keinginan seseorang pada waktu tertentu dapat terpenuhi dan terpuaskan.

Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 berdasarkan hasil indeks dalam dimensi kepuasan hidup berkisar antara 70,19 sampai 82,41.



Dimensi perasaan (*affect*) pada Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) Kabupaten Badung Tahun 2019 bertujuan untuk memperoleh tingkat kebahagiaan hidup responden yang didekati dengan ukuran perasaan (*afeksi*) yang dirasakan responden dalam hidupnya. *Afeksi* merupakan kondisi perasaan yang bersifat relatif stabil, bukan emosi sesaat, dan tidak mudah berubah dalam waktu singkat akibat keadaan dan *mood*.

Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 menggambarkan bahwa dimensi perasaan senang dan riang atau gembira mencapai indeks sebesar 78,96, diikuti perasaan tidak tertekan 75,16, dan perasaan tidak khawatir atau cemas 73,05.





Dimensi makna hidup bertujuan untuk memperoleh penilaian terkait dengan makna hidup (*Eudaimonia*) yang alami masyarakat. Dimensi makna hidup (*eudaimonia*) Kabupaten Badung Tahun 2019 ini terdiri atas 6 (enam) indikator, yaitu (1) kemandirian (*autonomy*); (2) penguasaan lingkungan (*environmental mastery*), (3) pengembangan diri (*personal growth*); (4) hubungan positif dengan orang lain (*positive relation with others*), (5) tujuan hidup (*purpose in life*) dan (6) penerimaan diri (*self acceptance*).



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat didukung oleh 2 program dan 3 kegiatan. Program pendukung meliputi: Peningkatan penelitian dan pengembangan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 999.407.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 847.001.950,- dengan serapan anggaran sebesar 84,75%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks kebahagiaan antara lain: meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan, program pro rakyat yang meringankan beban masyarakat seperti: program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan untuk perbaikan rumah, pemberian bantuan usaha ekonomi kreatif, bantuan usaha pertanian dan





peternakan, bantuan sosial kemasyarakatan untuk keagamaan, jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat antara lain: peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan akses terhadap pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan), rasa aman, peningkatan jaminan sosial, serta perbaikan lingkungan pemukiman.

Analisis Kinerja Sasaran 9 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Faktor kemiskinan bukan saja akibat masalah fisik atau rumah semata-mata, namun dipengaruhi faktor kemudahan akses dan mentalitas.

Pemerintah Kabupaten Badung sangat serius dalam pengetasan kemiskinan sebagai upaya untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen maka sasaran strategis RPJMD salah satunya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dengan formula jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk kali 100.

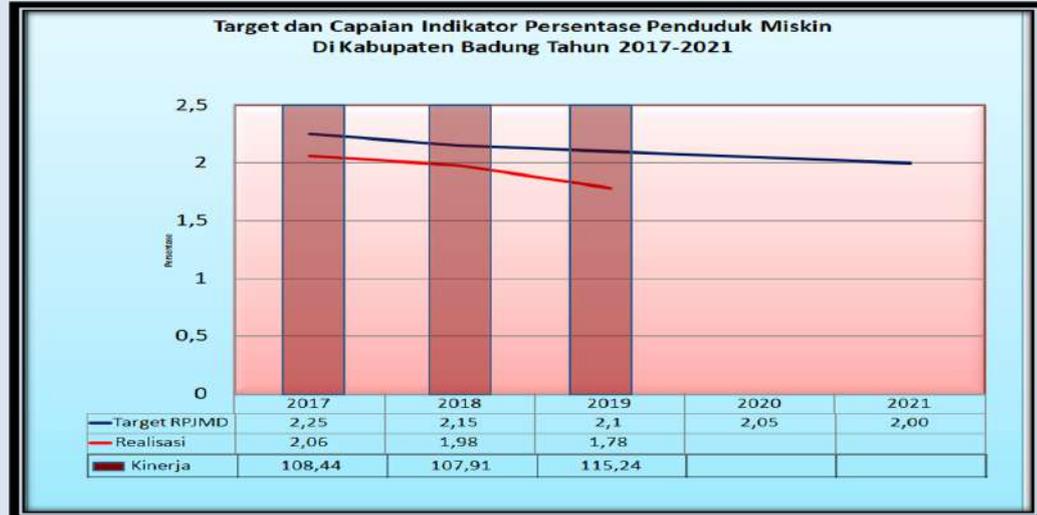
Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2019 sebesar 1,78% dari target sebesar 2,15%-2,10% berarti capaian kinerjanya sebesar 115,24% berarti telah mencapai target yang ditetapkan. Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 1,98% dari target kisaran 2,25 % - 2,15 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian telah mencapai target sebesar kurang dari 2%.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung termasuk *hardrock poverty*, dimana kondisi kemiskinan sudah sangat rendah, sehingga memerlukan komitmen dan kerja keras karena sudah sangat sulit untuk diturunkan bagaikan memecah batu karang yang sangat keras. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Bali, dalam 10 tahun terakhir tingkat trend kemiskinan di Badung selalu berada dibawah kemiskinan Provinsi Bali dimana tahun 2019 sebesar 3,79% sedangkan tahun 2018 tingkat kemiskinan Provinsi Bali adalah 4,01%. Secara lengkap target dan realisasi indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung tahun 2017-2021 seperti grafik 3.20 berikut :





Grafik 3.20
 Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin
 di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Data jumlah penduduk tergolong miskin di Kabupaten Badung tahun 2019 sebanyak 11.890 jiwa dibandingkan tahun 2018 sebanyak 12.970 jiwa sehingga terjadi pengurangan kemiskinan tahun 2019 sebanyak 1.080 jiwa. Adapun rincian perkembangan jumlah penduduk miskin periode 2015-2019 seperti grafik 3.21 berikut :

Grafik 3.21
 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020





Distribusi Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali menunjukkan persentase penduduk miskin yang paling rendah Kabupaten/Kota Kabupaten Badung, sedangkan yang paling tinggi yaitu Kabupaten Karangasem sebesar 6,25%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung tahun 2019 dibawah angka Nasional sebesar 9,22%. Secara Lengkap distribusi persentase penduduk miskin menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali dan Nasional seperti grafik 3.22 berikut:

Grafik 3.22

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017-2019



Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program-program strategis yang dituangkan pada APBD Badung dalam penanganan kemiskinan. Program tersebut dapat memberikan nilai yang strategis dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penetapan sasaran untuk program perlindungan sosial. Penanganan kemiskinan ini telah tercantum dalam program *Asta Marga Utama Desa* yang utamanya untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Upaya untuk mewujudkan sasaran menurunnya angka kemiskinan didukung oleh 5 program dan 25 kegiatan. Program pendukung meliputi: Peningkatan penelitian dan pengembangan, dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.912.057.370,- dengan realiasi sebesar Rp. 6.373.125.435,- dengan serapan anggaran sebesar 92,20%.

Menurunnya angka kemiskinan tersebut diatas, menunjukkan komitmen kami dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang dilaksanakan seperti program bedah rumah dimana setiap rumah tangga dianggarkan Rp.55 juta yang secara teknis cukup untuk membangun rumah





sederhana, layak huni dan berkualitas, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan, program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta upaya mencegah bertambahnya kemiskinan melalui program pemberian santunan penunggu pasien, pelatihan ketrampilan pijat kepada penyandang disabilitas dan pemberian perlindungan sosial bagi lansia (santunan lansia) telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung.

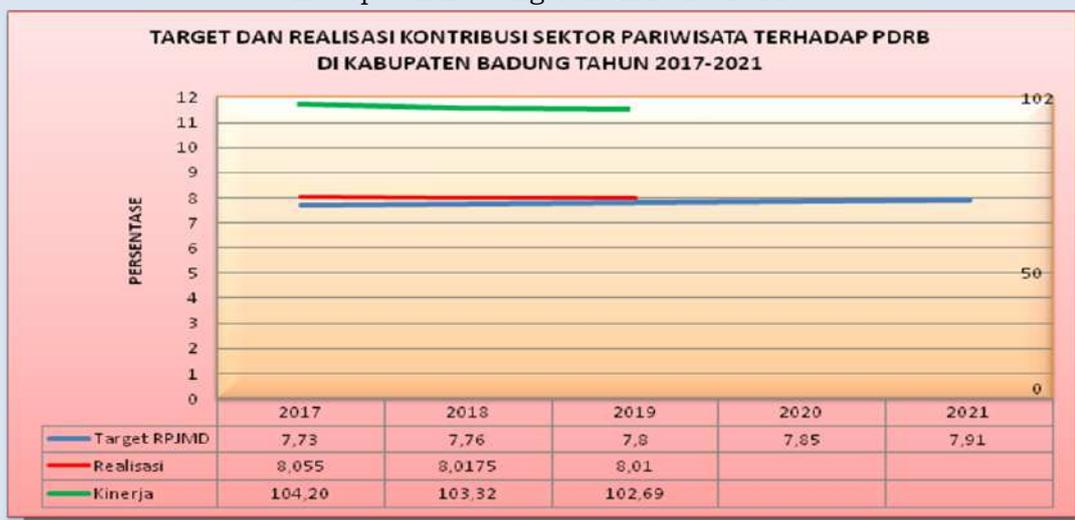
Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Badung melalui : pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga sasaran melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan untuk kelompok usaha ekonomi produktif (UEP).

Analisis Kinerja Sasaran 10 : Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor UMKM Terhadap PDRB dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Penetapan target kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB berdasarkan 3 lapangan usaha yaitu industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Khusus untuk sektor UMKM dipakai 75% dari kontribusi 3 lapangan usaha tersebut.

Grafik 3.23

Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2017-2021





Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB dengan indikator persentase kontribusi sektor UMKM Terhadap PDRB diperoleh hasil untuk tahun 2019 sebesar 8,01% dari target yang ditetapkan sebesar 7,80% sehingga kinerjanya sebesar 102,69%. Hasil capaian tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan capaian 8,017% dengan kinerja sebesar 103,32%. Demikian juga capaian tahun 2019 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 7,91%.

Upaya pencapaian target 2019 didukung oleh bertambahnya industri pengolahan/manufacturing serta meningkatnya komponen perdagangan yang dilakukan oleh UMKM melalui program pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta adanya program inovasi berupa Klinik UMKM serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan tera ulang sekaligus memberikan perlindungan/keamanan kepada konsumen. Dengan demikian, sektor UMKM diharapkan semakin meningkat serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Terjadinya peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB didukung oleh berkembangnya industri pengolahan yang berasal dari kayu dan rotan yang sangat diminati oleh wisatawan dan kebutuhan lokal serta lapangan usaha perdagangan mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya namun masih memberikan sumbangan terhadap kontribusi PDRB Badung.



Wakil Bupati Badung memantau Pameran Produk UMKM





Tabel 3.5
 Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019

	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6,57	6,35	6,00	5,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,29	0,28	0,27
C	Industri Pengolahan	3,99	3,74	3,67	3,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,20	0,20	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,22	0,21
F	Konstruksi	8,24	8,36	8,72	8,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,31	6,32	6,35	6,38
H	Transportasi dan Pergudangan	25,43	25,48	25,65	25,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,50	28,93	28,84	28,67
J	Informasi dan Komunikasi	5,59	5,49	5,50	5,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,49	2,41	2,46
L	Real Estate	3,16	3,18	3,17	3,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,69	0,68	0,67	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,14	3,25	3,28	3,13
P	Jasa Pendidikan	3,06	2,99	3,00	2,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,28	1,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,72	0,74	0,76	0,78
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2016-2019

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB didukung oleh 11 program dan 25 kegiatan. Program pendukung meliputi: Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Pengembangan dan Peningkatan ekspor, Peningkatan Tertib Ukur, Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha kecil dan menengah yang kondusif, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Data/informasi, Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan, Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri, Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Penyiapan Potensi Sumber Daya, sarana dan prasarana daerah. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.417.187.891,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.719.651.339,- dengan serapan anggaran sebesar 89,13%.





Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB antara lain peningkatan manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM, pendidikan dan pelatihan wirausaha, peningkatan kemudahan akses modal, promosi/pameran kerajinan, Pelayanan klinik UMKM, revitalisasi pasar rakyat serta kegiatan yang meningkatkan pemasaran hasil produksi UMKM.

Analisis Kinerja Sasaran 11 : Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda Dan Perkada

Sesuai visi RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 Kabupaten Badung berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, artinya pemerintah menjamin masyarakat untuk merasa aman dan nyaman terhadap terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Perda dan Perkada khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan. Komitmen tersebut tertuang dalam sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya pencegahan pelanggaran peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan indikator persentase pencegahan perda dan perkada. Formula dari indikator persentase pencegahan perda dan perkada adalah Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi seluruh indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100.

Hasil capaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2019 sebesar 100% dari target sebesar 90% berarti capaian kinerjanya sebesar 111,11%. Hasil capaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 92,78% dari target 85%. Sedangkan jika dibanding dengan dengan target akhir RPJMD maka capaian telah mencapai target sebesar 100%.

Grafik 3.24

Target dan Capaian Indikator Persentase Pencegahan Perda dan Perkada di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021





Berdasarkan data yang ada selama tahun 2019 terdapat indikasi pelanggaran perda/perkada sebanyak 2.198 melalui berbagai upaya pencegahan yang dilakukan, dari 2.198 indikasi pelanggaran seluruhnya (100%) indikasi pelanggaran mampu dicegah melalui tindakan preventif serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum sehingga indikasi pelanggaran semakin menurun. Secara lengkap jenis potensi pelanggaran yang dapat dicegah seperti tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6

Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2019

KECAMATAN	JENIS POTENSI PELANGGARAN							JM LAH	POTENSI PELANGGARAN DI CEGAH							JUM LAH	REALI SASI %
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		
Petang	62	13	84	5	1	0	29	194	62	13	84	5	1	0	29	194	100
Abiansemal	99	31	72	1	0	1	99	303	99	31	72	1	0	1	99	303	100
Mengwi	158	10	58	0	0	0	55	281	158	10	58	0	0	0	55	281	100
Kuta Utara	149	9	65	0	1	0	105	329	149	9	65	0	1	0	105	329	100
Kuta	172	1	116	10	4	0	181	484	172	1	116	10	4	0	181	484	100
Kuta Selatan	137	0	165	0	3	7	295	607	137	0	165	0	3	7	295	607	100
Kabupaten	777	64	560	16	9	8	764	2.198	777	64	560	16	9	8	764	2.198	100

Keterangan : 1. IMB + Usaha tanpa ijin, 2. Jalur Hijau, 3. Reklame, 4. Gepeng dan orang terlantar, 5. Usaha Pariwisata, 6. Pencemaran Lingkungan, dan 7. Pelanggaran Trotoar



Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Badung menggelar Penaecekan Ijin Banaunan di Lapangan Puspem Baduna.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada didukung oleh 2 program dan 4 kegiatan. Program pendukung





meliputi: program pendidikan politik masyarakat, program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemberantasan penyakit masyarakat, program penguatan ideologi dan pengembangan wasbang dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.208.966.500,- dengan realiasi sebesar Rp. 2.107.086.100,- dengan serapan anggaran sebesar 95,39%.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini melalui: sosialisasi tentang peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, patroli keliling secara rutin, menggalang kemitraan dengan satuan keamanan lainnya.

Analisis Kinerja Sasaran 12 : Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada

Perda dan Perkada dimaksudkan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari pencapaian visi sesuai tertuang dalam RPJMD yaitu sasaran strategis meningkatnya penegakan perda dan perkada dengan indikator persentase penegakan perda dan perkada. Adapun formula dari indikator persentase penegakan perda dan perkada adalah Jumlah pengaduan pelanggaran perda dan perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran perda dan perkada kali 100.

Hasil capaian indikator persentase pencegahan Perda dan Perkada tahun 2019 sebesar 85,17% dari target sebesar 85% berarti capaian kinerjanya sebesar 100,20%. Hasil capaian indikator persentase penegakan perda dan perkada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 96,56% dari target 80%. Sedangkan jika dibanding dengan dengan target akhir RPJMD maka capaian masih dibawah target sebesar 95%.

Grafik 3.25

Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021





Berdasarkan hasil pendataan penegakan perda dan perkada tahun 2019 sebanyak 654 jenis pelanggaran, dan yang tertangani sebanyak 557 jenis pelanggaran atau sebesar 85,17%. Jenis pelanggaran perda dan perkada tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 terdapat 3.609 kasus pengaduan pelanggaran perda/perkada, dari jumlah tersebut, sebanyak 3.485 berhasil ditangani atau realisasinya mencapai 95 %. Penegakan Perda dilakukan melalui program pemeliharaan ketertiban umum dan pencegahan tindak kriminal berupa kegiatan operasi Tibum dan Tranmas, Tipiring dan Pengamanan Event-event penting, penanganan pelanggaran yang melalui pemanggilan sampai dengan pembongkaran serta pemberkasan sesuai prosedur yang berlaku. Secara lengkap jenis pelanggaran perda dan perkada serta jumlah yang ditangani seperti tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
 Jenis Pelanggaran yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Badung Tahun 2019

No	KECAMATAN	JENIS PELANGGARAN				JUM LAH	JENIS PELANGGARAN YANG DITANGANI				JUM LAH	%
		1	2	3	4		1	2	3	4		
1	Petang	19	0	0	0	19	19	0	0	0	19	100,0
2	Abiansemal	30	17	2	21	70	27	17	2	21	67	95,7
3	Mengwi	47	70	17	0	134	41	70	17	0	128	95,5
4	Kuta Utara	78	21	52	2	153	55	21	52	2	130	85,0
5	Kuta	81	0	20	1	102	61	0	15	0	76	74,5
6	Kuta Selatan	98	43	34	1	176	76	36	24	1	137	77,8
	Kabupaten	353	151	125	25	654	279	144	110	24	557	85,17

Keterangan : 1. Pembongkaran Reklame, 2. Tipiring, 3. Pengaduan Masyarakat, 4. Penyegelan Usaha

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya penegakan perda dan perkada didukung oleh 3 program dan 4 kegiatan. Program pendukung meliputi: program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program penguatan idiologi dan pengembangan wasbang, program pemeliharaan tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal serta program peningkatan disiplin aparatur dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.416.420.900,- dengan realiasi sebesar Rp. 3.339.212.700,- dengan serapan anggaran sebesar 97,74%.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran yaitu : rata - rata usia personil PNS diatas umur 50 tahun sehingga gerak dan tindakan sudah melambat, Berkurangnya PPNS karena mutasi pada saat ini masih ada 4 orang PPNS, Belum





semua personil memiliki sertifikat Diklatsar Polisi Pamong Paja dan kurangnya pemahaman terhadap perkembangan peraturan perundang – undangan. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran antara lain : Satpol PP Kabupaten Badung tipe A, Jumlah personil yang cukup banyak yaitu, 195 PNS, 2 THL, 115 tenaga kontrak, sarana dan prasarana kerja cukup bagus dan lengkap, loyalitas personil yang baik dengan adanya jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kabupaten Badung, dan Sejak awal tahun 2017 bergabungnya Linmas pada masing - masing desa atau kelurahan dalam wadah Sat Pol PP merupakan mata telinga dalam menjaga ketertiban umum ketentraman masyarakat.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian sasaran ini antara lain : Memberi kesempatan Diklat dan tes kopetensi untuk jampung Sat Pol PP, melibatkan linmas dan aparat desa atau kelurahan saat pelaksanaan penertiban wilayah di 6 Kecamatan. Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan capaian sasaran pada tahun kedepan sinergitas semua perangkat daerah, instansi vertikal, Instansi Penegak Peraturan dalam pelaksanaan oprasional di lapangan secara bersama untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membuat MOU antar aparat dan penegak hukum yan terkait dengan tindak lanjut membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran ini melalui: penegakan perda dan perkara seperti penandatanganan pernyataan, pelaksanaa tindak pidana ringan, dan pembongkaran.





Analisis Kinerja Sasaran 13 : Meningkatnya Pengarustamaan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDP). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari 4 indikator yang lebih menekankan pada status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini, mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.

Pada dasarnya IPG dihitung dari variabel yang sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya dalam penghitungan IPG, rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks pembangunan manusia, IPG dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan pembangunan yang berbasis gender. Semakin tinggi IPG suatu wilayah atau negara, semakin rendah kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Hasil capaian indikator indeks pembangunan gender (IPG) tahun 2019 sebesar 94,68 dari target sebesar 75,87 berarti capaian kinerjanya sebesar 124,79%. Hasil capaian indikator indeks pembangunan gender tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 94,39 dari target 75,74. Sedangkan jika dibanding dengan dengan target akhir RPJMD maka capaian telah melampaui target sebesar 76,13. Hasil capaian IPG yang tinggi menunjukkan di Kabupaten Badung hampir tidak ada ketimpangan yang cukup berarti dalam pembangunan jika dilihat dari perspektif gender. Secara lengkap perkembangan IPG di Kabupaten Badung seperti grafik 3.26 berikut:

Grafik 3.26
 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung Tahun 2016-2018





Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Badung tahun 2018 dan tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Bali dan IPG Nasional.

Grafik 3.27

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung Tahun 2018-2019



Berdasarkan data distribusi indeks pembangunan gender yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa dari tiga komponen tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 dibandingkan 2019. Secara lengkap perbandingan indikator IPG seperti grafik berikut :

Grafik 3.28

Distribusi Indeks Pembangunan Gender Menurut Komponen di Kabupaten Badung Tahun 2018-2019





Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya pengarusutamaan gender didukung oleh 4 program dan 14 kegiatan. Program pendukung meliputi: program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.836.578.308,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.585.880.950,- dengan serapan anggaran sebesar 86,35%.

Upaya – upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan gender (IPG) antara lain meningkatkan program pendidikan vokasional (keterampilan) khususnya pada perempuan usia kerja. meningkatkan kampanye program Generasi Berencana (GENRE) pada kelompok remaja di Kabupaten Badung

Analisis Kinerja Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas lingkungan hidup merupakan data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung terkait dengan Tiga indikator yaitu kualitas udara, air dan tutupan hutan. IKLH disusun berdasarkan basis data hasil pengamatan yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. IKLH menjadi hal yang sangat penting diketahui mengingat saat ini tantangan yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembangunan semakin berat dan kompleks.

IKLH berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Pemerintah Kabupaten Badung tentang kondisi lingkungan, sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten Badung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Unggul | : > 90 |
| 2) Sangat Baik | : 82 - 90 |
| 3) Baik | : 74 - 82 |
| 4) Cukup | : 66 - 74 |
| 5) Kurang | : 58 - 66 |
| 6) Sangat Kurang | : 50 - 58 |
| 7) Waspada | : < 50 |





Pengukuran Indeks Pencemaran Udara merupakan hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan di 12 (dua belas) lokasi yang diambil dari laporan DLHK Kabupaten Badung, tahun 2017. Pemantauan kualitas udara dilakukan di dua lokasi di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Lokasi tersebut adalah di Pasar Petang dan Pertigaan SMKN Petang (Kecamatan Petang), Pasar Blahkiuh dan Pasar Mambal (Kecamatan Abiansemal), Perempatan Beringkit dan Pertigaan Sempidi (Kecamatan Mengwi), Perempatan Kerobokan dan Pertigaan Sunset Road (Kecamatan Kuta Utara), Simpang Dewa Ruci dan Pertigaan Tuban (Kecamatan Kuta) serta Perempatan Kampus Unud dan Perempatan Bualu (Kecamatan Kuta Selatan). Hasil pengukuran kualitas udara yaitu:

Tabel 3.8

Hasil Analisis Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Badung Tahun 2019

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO2	1.416666667	400	0.0035417
SO2	87.91666667	900	0.0976852
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0.0506134
Indeks Kualitas Udara			102.7437

Keterangan : *) Pergub Bali No. 16/2016

Pemantauan kualitas air dilakukan melalui pemantauan sungai yang melintas dan mengalir di wilayah Kabupaten Badung sebanyak 10 sungai yang dipantau dengan mengambil 60 titik pantau di musim kemarau dan musim hujan. Hasil pemantauan kualitas air seperti tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9

Hasil Analisis Indeks Kualitas Air di Kabupaten Badung Tahun 2019

Titik Pantau Berdasar Kualitas air	Jumlah	Persentase (%)	Bobot	Nilai (Persentase x Bobot)
Memenuhi Baku Mutu	0	0	70	
Tercemar Ringan	30	100	50	50
Tercemar Sedang	0	0	30	
Tercemar Berat	0	0	10	
Jumlah		100	-	50
Indeks Kualitas Air (IKA)				50

Perhitungan indeks tutupan lahan merupakan perbandingan luas hutan ataupun lahan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Angka persentase yang diwajibkan adalah 30% berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999





tentang Kehutanan. Hasil analisis tutupan hutan untuk Kabupaten Badung tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.10

Hasil Analisis Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Badung, Tahun 2019

Jenis Hutan	Luas (Ha)*	Luas Wilayah Kab Badung (Km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan	ITH
Hutan lindung	1.126,90			
Hutan Wisata (Sangeh)	13,97			
Tahura Ngurah Rai	639,00			
Taman Gumi Banten	15,00			
Subak Abian	8.432			
Total	1795,713	418.52	42,91	61,63

Atas dasar data tersebut diatas yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan maka diperoleh IKLH Kabupaten Badung pada tahun 2019 adalah seperti terlihat tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11

IKLH Kabupaten Badung Tahun 2019

No.	Variabel	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	IKU	30	102,74	30,822 *
2	IKA	30	50,00	15,00
3	ITH	40	61,53	24,612
4	IKLH			70,077

Hasil capaian indikator IKLH yang terdiri dari IPU, IPA dan ITH tahun 2019 sebesar 70,077 dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 67,94 sehingga kinerjanya sebesar 103,15%. Hasil capaian indikator IKLH tahun 2019 termasuk kategori cukup karena nilainya berkisar antara 66 – 74. Hasil capaian indikator tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 69,18. Sedangkan target IKLH Kabupaten Badung tahun 2021 ditargetkan sebesar 69,40 sehingga jika dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2019 berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Hasil capaian indikator IKLH Kabupaten Badung tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Kabupaten Buleleng sebesar 60 dan capaian IKLH





Provinsi Bali sebesar 61,18. Perbandingan IKLH Kabupaten Badung dengan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali seperti grafik 3.29 berikut :

Grafik 3.29

Perbandingan Hasil IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019



Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup bagi Kabupaten Badung, terkait erat dengan kebutuhan prioritas pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam salah satu dari 6 (enam) prinsip dasar pembangunan Kabupaten Badung salah satunya yaitu *pro environment* dan selaras dengan sasaran RPJMN, target sasaran IKLH tahun 2019 berkisar : 66,5-68,5. Indeks kualitas Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjaga kualitas air sungai di Kabupaten Badung.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya indeks kualitas udara didukung oleh 9 program dan 54 kegiatan. Program pendukung meliputi: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 82.834.350.768,- dengan realiasi sebesar Rp. 70.423.574.720,44,- dengan serapan anggaran sebesar 85,02%.

Faktor pendorong yang meningkatnya indeks kualitas udara di Kabupaten Badung antara lain :

1. Luas tutupan hutan agar tetap dipertahankan dengan tidak melakukan alih fungsi hutan ke peruntukan yang lain. Penyuluhan dan edukasi pada





masyarakat sekitar sangat perlu dilakukan sehingga masyarakat tidak melakukan perambahan hutan yang dapat mengganggu fungsi hutan dalam menjaga siklus hidrologis, khususnya yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air.

2. Melakukan pengamatan pada titik pantau secara konsisten baik dari segi waktu maupun titik lokasi sehingga dapat dimonitor perkembangan perubahan kualitas air dari tahun ke tahun dan diketahui faktor penyebab perubahannya.
3. Melakukan inventarisasi potensi dan masalah pengelolaan wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi salah satu sumber pencemar pada badan air sungai. Kajian geofisik kimia, biologi dan inventarisasi kegiatan serta studi masalah sosial ekonomi masyarakat di sekitar DAS perlu dilakukan untuk mencari solusi dalam mengurangi pencemaran pada badan sungai.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan IKLH di Kabupaten Badung adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengurangi pencemaran pada badan sungai, belum optimalnya program pemulihan terhadap sungai-sungai yang tercemar melalui berbagai program aksi, seperti prokasih (program kali bersih), Belum dimanfaatkan sungai sebagai sarana pariwisata dan kegiatan ekonomi seperti lomba mancing, pasar apung dan lainnya yang menjadikan sungai semakin terjaga.

Strategi yang ditempuh untuk lebih optimalnya peningkatan IKLH di Kabupaten Badung yaitu: 1) Meningkatkan penataan masyarakat terhadap lingkungan, 2) Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, 3) Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup, 4) Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung meliputi: Upaya untuk meningkatkan indeks kualitas air dengan cara menurunkan beban pencemaran melalui pengetatan baku mutu air limbah, pengolahan air limbah domestik dan usaha kecil menengah, restorasi (kualitas air) sungai, pengelolaan limbah plastik (GOTIK), serta pemantauan dan pengawasan sumber-sumber pencemar. Upaya untuk meningkatkan indeks kualitas udara melalui intervensi peraturan (memperketat baku mutu emisi serta pembatasan beban emisi), penanaman pohon perindang untuk penyerapan gas karbondioksida yang berasal dari kendaraan melalui program *green transportation*. Sedangkan upaya untuk meningkatkan indeks tutupan hutan dan lahan melalui pemantauan perubahan





tutupan lahan, pemeliharaan tutupan hutan melalui berbagai program/kegiatan, dan penanaman pohon.

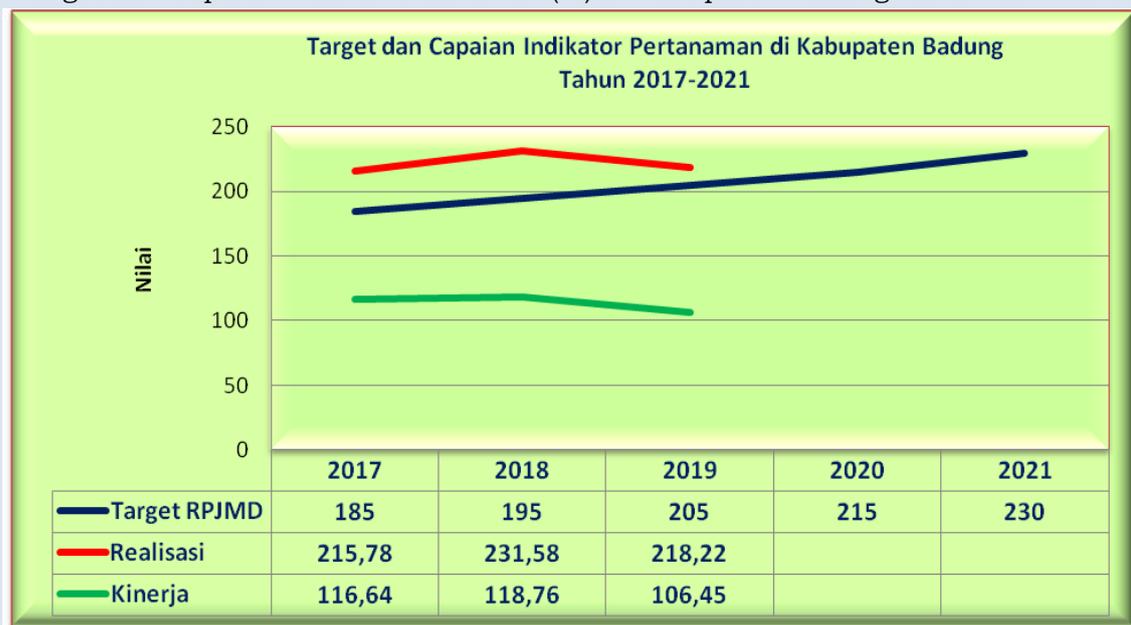
2. Indeks Pertanaman (IP)

Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan lahan maka dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 ditetapkan indikator Indeks Pertanaman. Indeks Pertanaman (IP) menunjukkan kerapatan pertanaman pada sebidang lahan. IP ini menunjukkan berapa kali melakukan penanaman padi, palawija dan hortikultura dalam setahunnya. Formula untuk menghitung indeks pertanaman adalah Luas tanam dibagi luas lahan kali 100.

Hasil capaian indikator indeks pertanaman tahun 2019 sebesar 218,22% dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 205% sehingga kinerjanya sebesar 106,45%. Hasil capaian indikator tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 231,58 atau capaian kinerjanya 118,76 persen. Sedangkan target indeks pertanaman Kabupaten Badung Akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 230 sehingga jika dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2019 berarti belum mencapai target yang ditetapkan. Secara lengkap Indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik 3.30 berikut :

Grafik 3.30

Target dan Capaian Indikator Pertanaman (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021





Indeks Pertanaman Kabupaten Badung lebih tinggi dibanding dengan indeks pertanaman Kabupaten Tabanan dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Buleleng. Indeks pertanaman sangat dipengaruhi oleh iklim dan ketersediaan air termasuk saluran irigasi pertanian.

Capaian indeks pertanaman disebabkan oleh karena adanya pendampingan yang semakin intensif dari PPL dan lebih terorganisirnya bantuan subsidi kepada petani serta adanya jaminan asuransi dari pusat dan pemerintah Kabupaten Badung. Semakin tinggi IP berarti semakin sering areal sawah ditanami sehingga pertanaman pada sebidang lahan semakin banyak proses fotosintesa yang terjadi dan menghasilkan Oksigen (O₂) untuk lingkungan hidup yang sehat.

Berdasarkan data lahan pertanian Kabupaten Badung seluas 27.741,89 Hektar terdiri dari 9.592,09 hektar sawah dan 18.149,80 lahan pertanian diluar sawah. Dari luas lahan pertanian yang ada luas tanam sebesar 20.931,46 hektar dan luas baku tanam sebesar 27.741,89 dengan indeks pertanaman sebesar 218,22 artinya lahan pertanian yang ada ditanami rata-rata dua kali setahun. Menurut Distribusi indeks pertanaman menunjukkan bahwa kecamatan dengan indeks pertanaman paling tinggi di Kecamatan Kuta Utara sebesar 232,12 sedangkan yang di Kecamatan Kuta Selatan tidak ada petani yang menanam tanaman pertanian. Secara lengkap distribusi IP menurut Kecamatan seperti table 3.12 berikut:

Tabel 3.12

Distribusi IP menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2019

No	KECAMATAN	LUAS LAHAN		LUAS LAHAN PERTANIAN (Hektar)	LUAS SAWAH DGN IIRIGASI	LUAS TANAM	LUAS BAKU TANAM	INDEKS PERTANAMAN (IP)
		SAWAH	NON SAWAH					
1	PETANG	1.200,56	8.911,00	10.111,56	1.201,00	2.736,00	10.111,56	227,89
2	ABIANSEMAL	2.888,49	3.048,10	5.936,59	2.888,50	5.575,28	5.936,59	193,02
3	MENGWI	4.414,04	2.175,00	6.589,04	4.388,00	10.105,93	6.589,04	228,95
4	KUTA UTARA	1.075,00	380,30	1.455,30	1.075,00	2.495,25	1.455,30	232,12
5	KUTA	14,00	170,00	184,00	14,00	19,00	184,00	135,71
6	KUTA SELATAN	0,00	3.465,40	3.465,40	0,00	0,00	3.465,40	0,00
	KABUPATEN	9.592,09	18.149,80	27.741,89	9.566,50	20.931,46	27.741,89	218,22

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Badung, Tahun 2019





Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya indeks pertanaman didukung oleh 2 program dan 3 kegiatan. Program pendukung meliputi: Program peningkatan produksi pertanian dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 617.647.555,- dengan realiasi sebesar Rp. 571.977.360,- dengan serapan anggaran sebesar 92,61%.

Faktor yang mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP) di Kabupaten Badung adalah Adanya bantuan Saprodi, Adanya Asuransi Tanaman Padi, saluran irigasi yang baik, pola tanam. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah Perbaikan saluran irigasi. Musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 2019.

Strategi untuk meningkatkan indeks pertanaman adalah meningkatkan intensifikasi tanaman dan Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pertanaman adalah penambahan irigasi/pengairan (pembangunan sumber-sumber air), pemanfaatan lahan pekarangan untuk lahan tanam, pengembangan hidroponik, dan Menambah luasan covering lahan yang mendapatkan Asuransi

Analisis Kinerja Sasaran 15 : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Kapasitas daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Tujuan peningkatan kapasitas adalah untuk menurunkan indeks resiko bencana. Sedangkan manfaatnya adalah memberikan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sehingga dapat meningkatkan ketahanan daerah serta menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, merujuk pada peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana yaitu dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan resiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian – capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.

Hasil capaian indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana tahun 2019 pada level IV dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar level IV sehingga kinerjanya sebesar 100%. Hasil capaian indikator tahun 2019 sama dengan tahun 2018 level IV. Sedangkan target tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung Akhir RPJMD tahun 2021 ditargetkan





level IV sehingga jika dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2019 berarti telah mencapai target yang ditetapkan. Secara lengkap tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.31
 Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2019



Berdasarkan kriteria tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung diperoleh informasi bahwa dari 7 kriteria maka Kabupaten Badung tahun 2019 memperoleh nilai 0,82 dari nilai 1. Dari 7 kriteria yang ada baru terpenuhi 1 (satu) kriteria yaitu Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu dengan nilai 1 (satu). Hasil capaian kriteria tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana tahun 2019 seperti grafik 3.32 berikut:

Grafik 3.32
 Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2019





Kabupaten Badung pada tahun 2019, telah melakukan penilaian mandiri terhadap indeks resiko bencana yang mengacu pada 7 indikator dengan menggunakan instrument indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dari hasil penilaian IKD menunjukkan telah terjadi penurunan indeks resiko bencana sebagai akibat dari peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Nilai 111 menunjukkan tingkat resiko bencana di Kabupaten Badung berada pada kategori sedang. Capaian penurunan indeks resiko bencana ini lebih tinggi dari target Nasional yaitu 30% pada tahun 2019. Dengan capaian tersebut maka tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung adalah berada pada level IV sesuai dengan target yang ditetapkan. **Klasifikasi Level 4** berarti dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. Pada akhir periode RPJMD semesata berencana tahun 2016-2021, harapan capaian penurunan indeks resiko bencana menjadi 100 (penurunan 40%) dengan tingkat kapasitas level V.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana antara lain menyiapkan desa/kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana. Di Kabupaten Badung telah memiliki 42 desa/kelurahan tangguh bencana dari 62 desa/kelurahan yang ada, atau capaian 67,74%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 31 Desa/kelurahan. Sedangkan untuk sekolah aman bencana sudah ada sebanyak 29 sekolah dari 32 sekolah di daerah rawan bencana atau 90,63%. Perkembangan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana seperti tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
 Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana
 Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DESA/KEL.	DESA/KEL TANGGUH BENCANA	%	SEKOLAH DI DAERAH RAWAN	SEKOLAH AMAN BENCANA	%
1	Petang	7	7	100,00	0	0	0
2	Abiansemal	18	14	77,78	0	0	0
3	Mengwi	20	11	55,00	1	0	0
4	Kuta Utara	6	2	33,33	0	0	0
5	Kuta	5	4	80,00	18	16	88,89
6	Kuta Selatan	6	4	66,67	13	13	100,00
	Kabupaten	62	42	67,74	32	29	90,63





Perkembangan desa aman bencana di Kabupaten Badung tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa desa/kelurahan aman bencana terus meningkat setiap tahunnya yang awalnya tahun 2014 sebanyak 4 desa menjadi 42 pada tahun 2019. Perkembangan desa/kelurahan aman bencana seperti grafik 3.33 berikut :

Grafik 3.33

Desa Tangguh Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2019



Perkembangan sekolah aman bencana di Kabupaten Badung tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa sekolah aman bencana terus meningkat setiap tahunnya yang awalnya tahun 2014 sebanyak 2 sekolah menjadi 29 sekolah pada tahun 2019. Perkembangan sekolah aman bencana seperti grafik 3.34 berikut :





Grafik 3. 34
Sekolah Aman Bencana Kabupaten Badung Tahun 2013-2018



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana didukung oleh 5 program dan 22 kegiatan. Program pendukung meliputi: program pencegahan dan kesiapsiagaan, program penanganan darurat bencana, program pemulihan pasca bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 17.157.188.430,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.745.847.710,- dengan serapan anggaran sebesar 91,77%.

Faktor yang mendorong peningkatan indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung yaitu:

1. Komitmen pemerintah pusat dan daerah mewujudkan upaya pengurangan resiko bencana
2. Terselenggaranya koordinasi antara penyelenggara penanggulangan bencana (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha)

Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam peningkatan tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung yaitu:

1. Masih kurangnya penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana
2. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi bencana maupun saat tanggap darurat
3. Masih kurangnya regulasi ditingkat desa/kelurahan yang mengatur upaya pengurangan resiko bencana maupun kerjasama dengan pihak terkait





4. Belum terbentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat Kabupaten.
 5. Perlu adanya penguatan struktur dan mekanisme penyampaian informasi kebencanaan
 6. Belum tersedia strategi, SOP dan mekanisme untuk ketersediaan energi listrik pada masa tanggap darurat
 7. Belum tersedia strategi, SOP dan mekanisme untuk pemenuhan kebutuhan pangan pada masa tanggap darurat
 8. Belum *update* kajian resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana
 9. Penegakan hukum terkait RTRWK sesuai pengurangan resiko bencana
 10. Belum tersedia rencana kontinjensi banjir, kekeringan
 11. Menyusun program desa tangguh bencana sesuai standar
 12. Menambah jumlah sekolah aman bencana
 13. Akreditasi Rumah sakit dan Puskesmas aman bencana
- Strategi kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yaitu :
1. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait
 2. Peningkatan pengelolaan informasi, dan percepatan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana vital
 3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan dalam pemulihan pasca bencana

Analisis Kinerja Sasaran 16 : Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah bahkan negara maju sekalipun. Masalah pengangguran, tidak hanya tentang masalah sosial tetapi juga berkaitan dengan permasalahan ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berupaya untuk menekan pengangguran. Hal ini tercermin dalam prioritas pembangunan untuk menekan tingkat pengangguran penduduk dengan sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dengan formula jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100.

Berdasarkan data BPS, hasil capaian indikator tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 sebesar 0,306% dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 0,325% sehingga kinerjanya sebesar 105,85%. Hasil capaian indikator tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,44% atau capaian kinerjanya 66,67%. Sedangkan target tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Badung Akhir





RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 0,31% sehingga jika dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2019 berarti telah mencapai target yang ditetapkan. Secara lengkap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik 3.35 berikut :

Grafik 3.35
 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung, 2019

Tingkat pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2019 sebesar 0,306% merupakan tingkat pengangguran paling rendah dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia. Secara lengkap perbandingan tingkat pengangguran Kabupaten Badung dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia seperti grafik 3.36 berikut:

Grafik 3.36
 Tingkat Pengangguran terbuka di Indonesia Tahun 2019





Sedangkan secara rinci distribusi tingkat pengangguran di Kabupaten Badung menurut kecamatan menunjukkan kecamatan dengan tingkat pengangguran yang paling tinggi di Kecamatan Mengwi sebesar 0,123% sedangkan tingkat pengangguran paling rendah di Kecamatan Kuta Selatan sebesar 0,001%.

Tabel 3.14

Distribusi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Badung Tahun 2019

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA (ANGKATAN KERJA)	Jml. PENDUDUK YANG BUKAN ANGGARAN KERJA	Jml. PENDUDUK BEKERJA	Jml. PENGANGGURAN	% PENGANGGURAN (TPT)
1	Petang	31.225	21.943	9.282	21.596	347	0,100
2	Abiansemal	93.958	64.912	29.046	64.639	273	0,079
3	Mengwi	123.994	86.957	37.037	86.530	427	0,123
4	Kuta Utara	80.670	59.453	21.217	59.448	5	0,001
5	Kuta	53.547	38.805	14.742	38.796	9	0,002
6	Kuta Selatan	104.931	75.532	29.399	75.528	4	0,001
	Kabupaten	488.325	347.602	140.723	346.537	1.065	0,306

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung, 2019

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja didukung oleh 10 program dan 21 kegiatan. Program pendukung meliputi: program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.609.661.990,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.299.497.894,- dengan serapan anggaran sebesar 96,40%.

Faktor yang menjadi pendorong turunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Badung antara lain:

- Meningkatnya daya saing tenaga kerja melalui pelatihan yang dilanjutkan dengan uji kompetensi dan sertifikasi.
- Adanya fasilitas sistem informasi industri dan tenaga kerja (SINAGA) yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan dan bagi pengguna tenaga kerja (perusahaan) dapat memasukan lowongan yang ada pada sistem tersebut
- Peluang menggunakan anggaran yang digunakan untuk uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sangat terbuka (APBD)

Sedangkan faktor yang masih menjadi penghambat tingkat pengangguran meliputi:

- Masih rendahnya kompetensi calon tenaga kerja, sehingga belum maksimal terserap di sektor formal dan informal





- b. Masih adanya calon tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman kerja
- c. Masih adanya masyarakat yang tidak mau bekerja atas kemauan sendiri/ karena ada warisan
- d. Terbatasnya personil/SDM pengantar kerja (pejabat fungsional)

Strategi kedepan yang akan dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan penurunan tingkat pengangguran yaitu :

- a. Alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- b. Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan assessor
- c. Meningkatkan sosialisasi UU Ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya perselisihan hubungan industrial
- d. Meningkatkan jumlah personil/SDM Pengantar Kerja (Pejabat Fungsional)
- e. Melakukan kerja sama dengan negara - negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
- f. Melakukan kerja sama dengan BBPLK Bandung
- g. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- h. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata



Kegiatan menjarit dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja di Kabupaten Badung





Analisis Kinerja Sasaran 17 : Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

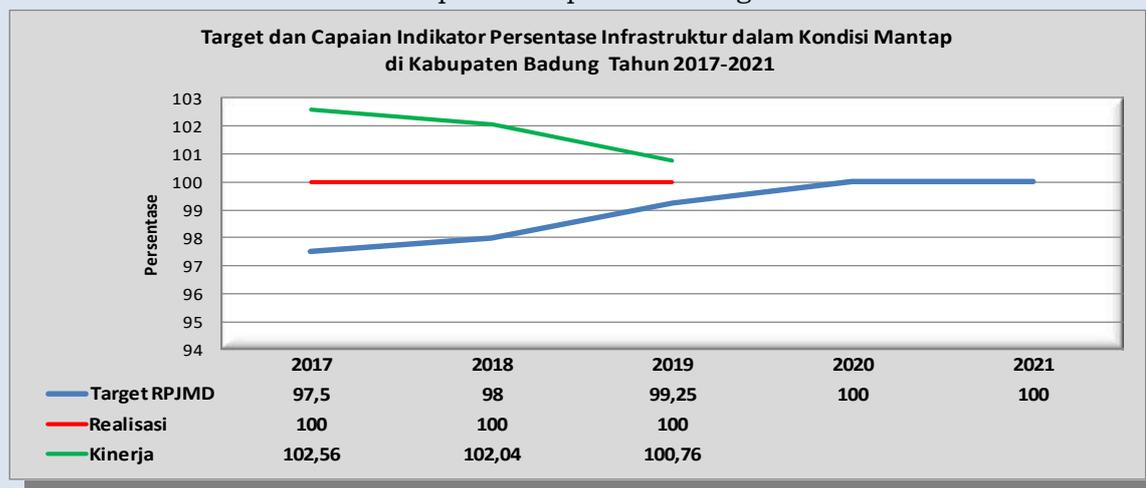
Infrastruktur wilayah yang mantap dan berkualitas diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional. Sebagai daerah tujuan wisata yang sudah terkenal Kabupaten Badung dituntut mampu menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor dari negara lain yang sama-sama mengandalkan sektor kepariwisataan. Salah satu infrastruktur jalan, jembatan dan trotoar serta saluran irigasi di Kabupaten Badung diharapkan semakin meningkat kualitasnya.

Indikator infrastruktur kondisi mantap merupakan indikator penilaian terhadap kondisi kemantapan jalan yang berkondisi sedang dan baik. Formula pengukuran infrastruktur kondisi mantap adalah Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100.

Hasil capaian indikator infrastruktur kondisi mantap tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 99,25% sehingga kinerjanya sebesar 100,76%. Hasil capaian indikator tahun 2019 sama dengan tahun 2018 sebesar 100%. Sedangkan target infrastruktur kondisi mantap Kabupaten Badung Akhir RPJMD tahun 2021 ditargetkan 100% sehingga jika dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2019 berarti telah mencapai target yang ditetapkan. Secara lengkap infrastruktur kondisi mantap di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik 3.37 berikut :

Grafik 3.37

Target dan Capaian Indikator Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021





Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Hasil capaian indikator infrastruktur kondisi mantap tahun 2019 telah tercapai sepenuhnya (100%) artinya infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Badung dalam kondisi mantap atau kondisi baik dan sedang. Berdasarkan data dari Dinas PUPR diperoleh data, dari 685,450 km Panjang Jalan, terdapat jalan kondisi baik sepanjang 619,175 km (90,33 %) dan kondisi sedang sepanjang 66,275 km (9,67%). Distribusi kondisi jalan di Kabupaten Badung berdasarkan kategorinya seperti tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15
 Distribusi Panjang Jalan dan Kondisi Jalan per Kecamatan
 di Kabupaten Badung Tahun 2019

No	KECAMATAN	PANJANG JALAN (km)	KONDISI JALAN			PANJANG JEMBATAN	KONDISI JEMBATAN		
			BAIK	SEDANG	RUSAK		BAIK	SEDANG	RUSAK
1	Petang	97,648	82,198	15,450	-	275,55	275,55	-	-
2	Abiansemal	131,408	117,553	13,855	-	251,6	246,3	5,3	-
3	Mengwi	169,15	154,39	14,760	-	240,2	230,5	9,7	-
4	Kuta Utara	101,08	97,38	3,700	-	64,0	64	-	-
5	Kuta	68,855	66,475	2,300	-	121,8	98,3	23,5	-
6	Kuta Selatan	117,309	101,179	16,130	-	327,75	327,75	-	-
	Kabupaten	685,450	619,175	66,275	-	1.280,9	1.242,4	38,5	-

Disamping kondisi jalan dan jembatan, prioritas infrastruktur lainnya seperti irigasi pertanian yang merupakan *crosscutting* program dalam menunjang keberhasilan sektor pertanian dalam arti luas. Distribusi panjang saluran di Kabupaten Badung seluas 1.845,6 kilometer yang meliputi 3 (tiga) kecamatan. Kondisi irigasi di Kabupaten Badung dengan kondisi baik sepanjang 355,88 kilometer, kondisi sedang sepanjang 122,88 kilometer dan rusak 212,80 kilometer.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas didukung oleh 16 program dan 51 kegiatan. Program pendukung meliputi: program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program peningkatan pelayanan angkutan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pembangunan prasarana dan fasilitas dan program pengembangan perumahan dan pemukiman dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 67.524.057.369,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.034.571.950,- dengan serapan anggaran sebesar 99,59%.

Faktor yang menjadi pendorong seluruh jalan di Kabupaten Badung dalam kondisi mantap antara lain:

1. Komitmen pimpinan kepala daerah untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur.





2. Peran serta masyarakat dalam upaya memelihara dan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Badung berupa pemberian informasi, saran dan pengaduan serta peran serta pembebasan lahan untuk pembangunan.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan infrastruktur dalam kondisi mantap adalah :

1. Masih terdapat kinerja rekanan yang belum optimal terhadap realisasi pekerjaan konstruksi yang berakibat kepada pencapaian kondisi infrastruksi di Kabupaten Badung.
2. Sinkronisasi anggaran yang belum memadai terhadap target sasaran yang seharusnya diselesaikan untuk pencapaian kondisi infrastruktur di Kabupaten Badung
3. Koordinasi lintas instansi pemerintah terhadap rencana pembangunan infrastruktur seperti : PLN, PDAM, Telkom

Strategi kedepan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan jalan di Kabupaten Badung yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur dan penganggaran melalui skema KPBU, kolaborasi antar instansi dalam peningkatan dan pembangunan insfrasrtuktur.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran ini antara lain: peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan baru dan rehabilitasi saluran irigasi dan pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, peningkatan lingkungan Sehat Perumahan, penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan prioritas daerah pariwisata.





Analisis Kinerja Sasaran 18 : Meningkatnya Produksi Pangan Nabati Dan Hewani

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencakupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa. Pola Pangan Harapan digunakan sebagai basis perencanaan dan penilaian kecukupan gizi seimbang pada tingkat makro. Pola Pangan Harapan sebagai salah satu indikator output pembangunan pangan termasuk evaluasi penyediaan pangan, konsumsi pangan, dan diversifikasi pangan.

Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dengan cara mengalikan antara persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat



konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Keragaman konsumsi pangan berdasarkan energi aktual dari Sembilan (9) kelompok pangan berdasarkan metode PPH dikelompokkan menjadi sangat kurang (<55), kurang (55-69), cukup (70-84), dan baik (≥ 85)

(Prasetyo *et al.* 2013).

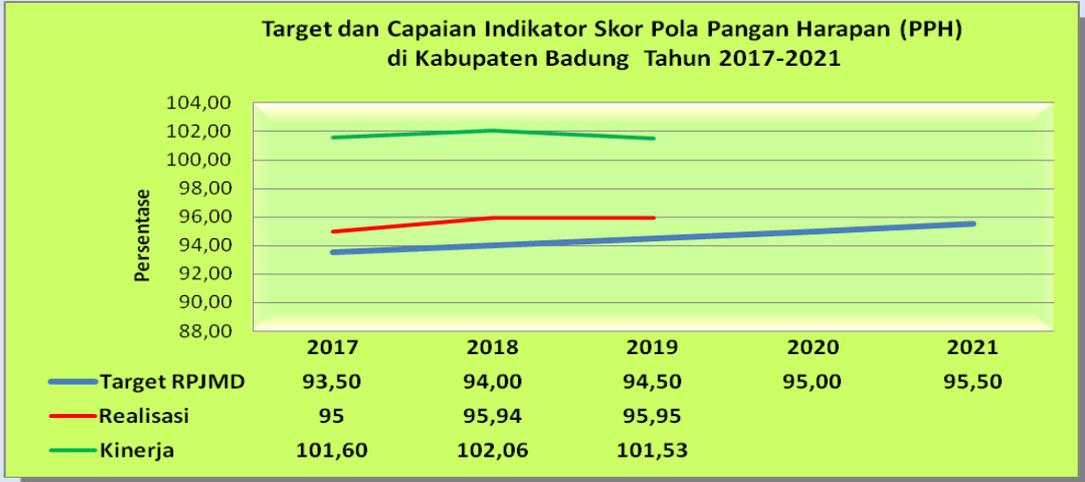
Realisasi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan rata-rata rumah tangga penduduk Kabupaten Badung tahun 2019 sebesar 95,95 dari target sebesar 94,50 sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,53%. Capaian skor PPH sebesar 95,95 termasuk **kategori baik**, Hal ini menggambarkan bahwa keragaman sumber kalori yang dikonsumsi masyarakat sudah beraneka ragam tidak hanya nasi, tetapi juga sumber kalori lain seperti umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor Pola Pangan Harapan tahun 2019 lebih tinggi capaiannya jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 95,94 dari target 94,00. Sedangkan capaian 2019 telah melampaui target akhir RPJMD semesta berencana 2016-2021 sebesar 95,5. Secara lengkap target dan capaian skor pola pangan harapan di Kabupaten Badung seperti grafik 3.38 berikut:





Grafik 3.38
 Target dan Capaian Indikator Skor Pola Panga Harapan (PPH)
 di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Badung Tahun 2019

Sedangkan hasil capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Badung tahun 2019 dibandingkan dengan kabupaten Buleleng dan Denpasar menunjukkan skor PPH Kabupaten Badung lebih tinggi berarti kualitas konsumsi pangan masyarakat Badung lebih baik. Nilai skor PPH Kabupaten Badung juga lebih tinggi dibandingkan dengan skor PPH Provinsi Bali sebesar 95,70.

Grafik 3.39
 Perbandingan Skor PPH Kabupaten Badung
 dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2019



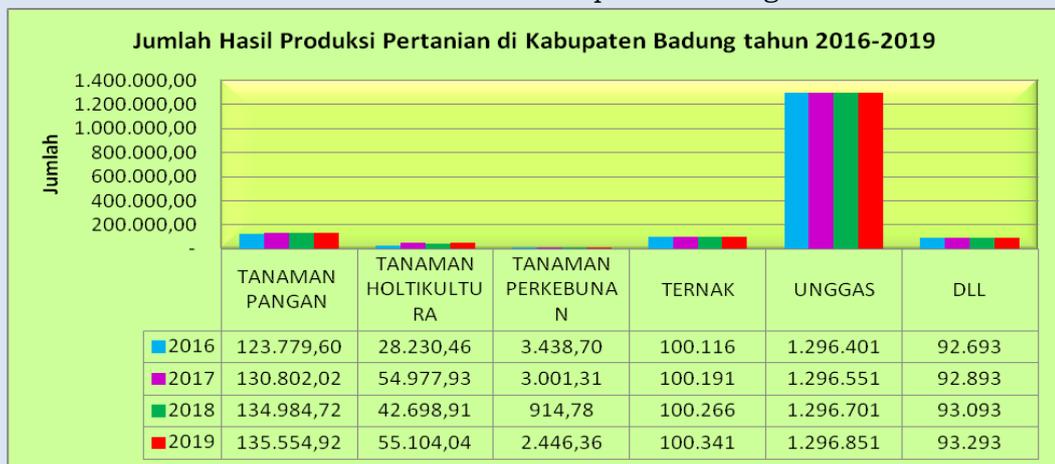


Untuk perbandingan skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung lebih tinggi jika dibandingkan dengan target Nasional tahun 2019 sebesar 92,5 dan realisasi tahun 2018 sebesar 91,3.

Skor Pola Pangan Harapan salah satunya ditentukan oleh jumlah produksi pertanian yang menentukan keanekaragaman konsumsi pangan. Hasil produksi pertanian di Kabupaten Badung untuk tanaman pangan periode tahun 2016-2019 menunjukkan tren peningkatan jumlah produksi, sedangkan untuk tanaman

hortikultura dan perkebunan mengalami penurunan pada tahun 2018. Untuk produksi ternak setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya konsumsi daging. Jumlah produksi pertanian dan peternakan seperti grafik 3.40 berikut:

Grafik 3.40
 Jumlah Hasil Produksi Pertanian di Kabupaten Badung Tahun 2016-2019



Sektor yang juga menjadi pengampu untuk peningkatan keanekaragaman sumber kalori yang berasal dari Ikan adalah Dinas Perikanan. Berdasarkan data





Dinas Perikanan Kabupaten Badung diperoleh informasi jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) terus meningkat, dengan gambaran produksi pada Tahun 2015 sebanyak 6.760,7 Ton dan tahun 2019 sebanyak 9.563,8 ton. Trend tingkat pemenuhan ikan di Kabupaten Badung tertinggi tahun 2018 sebesar 60% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 59,8%.

Tabel 3.16
 Jumlah Produksi Perikanan dan Kebutuhan Ikan
 di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019

No	TAHUN	JUMLAH PENDU DUK	PRODUKSI IKAN (TON)		TOTAL (TON)	STANDAR KONSUMSI IKAN/Org/ THN (TON)	TOTAL KEBUTUH AN IKAN (TON/THN)	% PEMENU HAN IKAN
			TANGKAP	BUDI DAYA				
1	2	3	4	5	6	7	8 (3x7)	9 (8/6*100)
1	2015	602.700	6.173,9	586,8	6.760,7	0,024	14.673,0	46,1
2	2016	616.400	6.458,8	595,4	7.054,2	0,024	15.006,6	47,0
3	2017	630.000	6.691,6	580,2	7.271,8	0,024	15.337,7	47,4
4	2018	643.500	8.780,3	735,2	9.515,5	0,024	15.666,3	60,7
5	2019	656.900	8.833,6	730,2	9.563,8	0,024	15.992,6	59,8

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2019

Peningkatan produksi perikanan ini oleh karena bantuan kepada masyarakat berupa pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya,serta adanya pembinaan dan temu teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya produksi pangan harapan didukung oleh 9 program dan 31 kegiatan. Program pendukung meliputi: program pengembangan

komunikasi, informasi dan media massa, program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program peningkatan pelayanan angkutan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pembangunan prasarana dan fasilitas dan program





pengembangan perumahan dan pemukiman dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.743.056.362,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.817.964.000,- dengan serapan anggaran sebesar 86,94%.

Faktor pendorong meningkatnya capaian indikator skor Pola Pangan Harapan adalah pengetahuan masyarakat tentang peningkatan gizi sangat tinggi seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, ketersediaan keanekaragaman pangan, meningkatnya pola hidup sehat yang mengurangi asupan karbohidrat yang berlebihan, peningkatan pembenihan ikan dengan membangun benih ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan antara lain :

- a) Pola pikir masyarakat yang masih mengutamakan konsumsi beras
- b) Konsumsi pangan masyarakat belum beragam
- c) Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan fungsi ekonomi.
- d) Perubahan cuaca yang menyebabkan banyaknya kematian ikan budidaya dan susahny nelayan untuk melaut.
- e) Tingkat penguasaan teknologi yang masih terbatas di kalangan pembudidaya ikan dan nelayan di Kabupaten Badung
- f) Banyaknya terjadi alih profesi dari pembudidaya, terutama budidaya rumput laut dan nelayan yang menjadi pelaku usaha pariwisata.
- g) Masih rendahnya kemampuan Balai Benih Ikan dalam memproduksi bibit ikan yang diperlukan kelompok pembudidaya.
- h) Terbatasnya lokasi pemeliharaan dan pengembalaan itik.



Upaya-upaya untuk meningkatkan skor pola pangan harapan meliputi : Meningkatkan sosialisasi mengenai keanekaragaman konsumsi makanan, meningkatkan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sehingga memberi nilai





tambah, menumbuhkan gerakan generasi muda sebagai petani, mengalakkan asuransi pertanian, meningkatkan pertanian organic.



Analisis Kinerja Sasaran 19 : Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dan motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung, sehingga menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, sasaran meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing dengan indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing merupakan bentuk komitmen menjaga keberlangsungan sektor kepariwisataan. Formula dari indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing adalah Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100.

Daya Tarik Wisata (DTW) dalam laporan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 tahun 2010 tentang standarisasi Daya Tarik Wisata (DTW). Berdasarkan Peraturan Gubernur disebutkan bahwa standar daya tarik wisata harus memenuhi persyaratan standar antara lain: memiliki manajemen pengelolaan, fasilitas toilet, P3K, loket penjualan tiket, petugas keamanan, petugas parkir, tempat sampah, media informasi dan memiliki usaha penunjang seperti *art shop*. Oleh karena itu, setiap obyek wisata perlu dilakukan penataan agar memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga bisa kompetitif dengan DTW daerah lainnya.

Data capaian kinerja persentase daya tarik wisata yang berdaya saing disajikan dalam grafik 3.41 berikut ini:





Grafik 3.41
 Persentase Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing
 di Kabupaten Badung Tahun 2017-2019



Hasil pengukuran capaian indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing tahun 2019 sebesar 69,44% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,64%. Hasil capaian tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 66% dari target yang ditetapkan sebesar 66%. Capaian indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing tahun 2019 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan capaian masih dibawah target namun telah sesuai dengan target tahunan.

Tabel 3.17

Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Badung Tahun 2019

No	KECAMATAN	JUMLAH DTW YANG ADA	JUMLAH DTW SESUAI STANDAR	%	JUMLAH DESA WISATA	JUMLAH DESA WISATA BERKEMBANG/MAJU	%
1	Petang	5	4	10,25	5	1	11
2	Abiansemal	3	3	8	2	2	8,3
3	Mengwi	5	2	5,12	4	2	5,5
4	Kuta Utara	3	2	5,12	-	-	5,5
5	Kuta	5	3	8	-	-	8,3
6	Kuta Selatan	15	12	28,20	-	-	30,5
	Kabupaten	36	25	69,44	11	6	54,55

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung tahun 2019





Berdasarkan tabel diatas, distribusi daya tarik wisata menurut kecamatan di Kabupaten Badung tahun 2019 menunjukkan kecamatan dengan daya tarik wisata yang sesuai standar yang tertinggi di Kecamatan Kuta Selatan sebesar 69,44% dan terendah di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara sebesar 5,12%.

Dengan adanya daya tarik wisata yang memenuhi standar dapat meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing, sehingga Kabupaten Badung tetap menjadi daerah tujuan wisata utama di Provinsi Bali dengan didukung oleh program pemasaran pariwisata dengan kegiatan promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing didukung oleh 3 program dan 25 kegiatan. Program pendukung meliputi: Pengembangan dan Pengelolaan produk wisata dll. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 29.580.398.252,- dengan realiasi sebesar Rp. 28.835.767.259,- dengan serapan anggaran sebesar 97,48%.

Upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini meliputi: pengalokasian anggaran untuk perbaikan daya tarik wisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan pengelolaan produk-produk wisata.



Sektor pariwisata di Kabupaten Badung memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta PAD menjadi kontribusi terbesar dalam anggaran belanja daerah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB terutama didukung bidang usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan





pergudangan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan besarnya peran sektor pariwisata dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Badung maka sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan.

Grafik 3.42
 Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
 Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Hasil pengukuran capaian indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2019 sebesar 28,67% dari target yang ditetapkan sebesar 28,58%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,31%. Hasil capaian tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 28,84% dari target yang ditetapkan sebesar 28,36%. Capaian indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2019 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan capaian belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi trend sesuai target RPJMD.





Tabel 3.18
 Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019

	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6,57	6,35	6,00	5,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,29	0,28	0,27
C	Industri Pengolahan	3,99	3,74	3,67	3,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,20	0,20	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,22	0,21
F	Konstruksi	8,24	8,36	8,72	8,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,31	6,32	6,35	6,38
H	Transportasi dan Pergudangan	25,43	25,48	25,65	25,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,50	28,93	28,84	28,67
J	Informasi dan Komunikasi	5,59	5,49	5,50	5,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,49	2,41	2,46
L	Real Estate	3,16	3,18	3,17	3,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,69	0,68	0,67	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,14	3,25	3,28	3,13
P	Jasa Pendidikan	3,06	2,99	3,00	2,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,28	1,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,72	0,74	0,76	0,78
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kabupaten Badung, 2016-2019

Berdasarkan tabel distribusi PDRB diperoleh informasi sektor pariwisata setiap tahun memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Badung dibandingkan dengan sektor lainnya, dimana pada tahun 2019 sektor pariwisata memberikan kontribusi terbesar yaitu 28,67% dibandingkan dengan sektor lainnya. Tingginya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dan meningkatnya obyek wisata baru, diselenggarakannya berbagai acara MICE berskala nasional dan internasional.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan. Program pendukung





meliputi: Pengembangan dan Pengelolaan produk wisata. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 625.224.899,- dengan realiasi sebesar Rp. 619.163.156,- dengan serapan anggaran sebesar 99,03%.

Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB antara lain: program pengembangan dan pengelolaan produk wisata dengan kegiatan pelatihan dan pengawasan usaha industri pariwisata, monitoring dan evaluasi pungutan retribusi obyek wisata, pembinaan bidang daya tarik wisata, percepatan sertifikasi usaha dan penyusunan data base industri pariwisata

3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “*Money Follows Program*” yaitu perubahan paradigma pendekatan anggaran yang lebih focus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan money follows program, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi



(*money follows function*). Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2019 sebesar Rp. 822.283.070.004,28- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 750.904.939.175,12- sehingga





prosentase penyerapan sebesar 91,32%. Sasaran strategis didukung program sebanyak 130 dan kegiatan sebanyak 437. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis seperti table 3.19 berikut:

Tabel 3.19
 Sasaran Strategis, Jumlah Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Anggaran
 Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	4	5	921.603.100	902.766.600	97,96
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	5	43	206.403.401.812	175.906.119.032	85,22
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	9	16	9.659.695.800	1.929.551.300	19,98
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	6	23	5.018.274.427	4.492.179.517	89,52
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5	6	609.693.537	474.192.913	77,78
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	9	25	7.786.227.510	7.127.280.621	91,54
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	12	41	349.019.617.579	336.324.504.019	96,36
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	2	3	999.407.200	847.001.950	84,75
9	Menurunnya angka kemiskinan	5	25	6.912.057.370	6.373.125.435	92,20
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	11	25	6.417.187.891	5.719.651.339	89,13
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	2	4	2.208.966.500	2.107.086.100	95,39
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	3	4	3.416.420.900	3.339.212.700	97,74





NO	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
13	Meningkatnya pengarasutamaan gender	4	14	1.836.578.308	1.585.880.950	86,35
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	9	54	82.834.350.768	70.423.574.720	85,02
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	5	22	17.157.188.430	15.745.847.710	91,77
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	10	21	8.609.661.990	8.299.497.894	96,40
17	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	16	47	67.524.057.369	67.034.571.950	99,59
18	Meningkatnya produksi pangan harapan	9	31	14.743.056.362	12.817.964.000	86,94
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	3	25	29.580.398.252	28.835.767.269	97,48
20	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	1	3	625.224.899	619.163.156	99,03
TOTAL		130	437	822.283.070.004	750.904.939.175	91,32

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Kriteria penilaian dari analisis efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 99% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 99%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi sasaran dengan realisasi anggaran. Kriteria penilaian analisis efektifitas yaitu: Nilai positif





berarti efektif (semakin tinggi nilainya berarti semakin efektif program dan kegiatan dalam mencapai sasaran), sedangkan nilai minus (negatif) berarti tidak efektif. Hasil Analisis efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran seperti tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20
 Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program/Kegiatan
 di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis	Realisasi Sasaran	Realisasi Anggaran	Efektivitas	Efisiensi
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	97,38	97,96	- 0,58	Tidak Efisien
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	107,79	85,22	22,57	Efisien
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	104,51	19,98	84,54	Efisien
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	99,87	89,52	10,36	Efisien
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		77,78		
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	100,00	91,54	8,46	Efisien
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	100,36	96,36	3,99	Efisien
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	105,02	84,75	20,27	Efisien
9.	Menurunnya angka kemiskinan	115,24	92,20	23,04	Efisien
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	102,69	89,13	13,56	Efisien
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	111,11	95,39	15,72	Efisien
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	100,20	97,74	2,46	Efisien
13.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	124,79	86,35	38,44	Efisien
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	104,80	85,02	19,78	Efisien





NO	Sasaran Strategis	Realisasi Sasaran	Realisasi Anggaran	Efektivitas	Efisiensi
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	106,45	91,77	14,67	Efisien
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	100,00	96,40	3,60	Efisien
17.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	105,85	99,59	6,26	Efisien
18.	Meningkatnya produksi pangan harapan	100,76	86,94	13,81	Efisien
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	101,53	97,48	4,05	Efisien
20.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	100,64	99,03	1,61	Efisien
	Total	104,68	88,55	16,13	Efisien

3.5 Prestasi/Penghargaan

Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya yang sungguh-sungguh tersebut diapresiasi oleh pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait dalam bentuk penghargaan dan prestasi. Kabupaten Badung tahun 2019 mendapat 52 penghargaan/prestasi, secara rinci seperti table 3.21 berikut :

Tabel 3.21

Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	PENGHARGAAN AKIP	EVALUASI AKIP TAHUN 2018	06 FEBRUARI 2019	Penghargaan AKIP dari MenPAN RB
2	GOLDEN AWARD SIWO PWI PUSAT	PEKAN OLAHRAGA DAN SENI DESA (PORSENIDES), PORSENI KECAMATAN , PORSENI KABUPATEN	08 FEBRUARI 2019	Penghargaan Golden Award SIWO PWI Oleh Ketua Umum PWI Pusat
3	PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN	PENILAIAN ANRI TERHADAP ARSIP DI KABUPATEN BADUNG	27 FEBRUARI 2019	Penghargaan Oleh Kepala ANRI





NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
4	PERINGKAT I KOMITMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA SE-BALI	RAKOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI BALI TAHUN 2019	26 APRIL 2019	Provinsi Bali
5	2 PENGHARGAAN DI BIDANG PARIWISATA KATEGORI BALI TOP HOSPITALITY LEADER	PENGHARGAAN ATAS LAYANAN TERBAIK DALAM BIDANG PARIWISATA	27 MEI 2019	Penghargaan Oleh Presiden ITTA Foundation 2019/2020
6	JUARA UMUM PORJAR BALI 2019	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR (PORJAR)	31 MEI 2019	Penghargaan Oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bali
7	PENGHARGAAN KAMPUNG KB PRAKARTI MADYA III TINGKAT NASIONAL	LOMBA KESATUAN GERAK PKK-KKBPK-KESEHATAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019	04 JULI 2019	Penghargaan Oleh Ketua TP- PKK Pusat
8	KALPATARU KATEGORI PENYELAMAT LINGKUNGAN KHUSUSNYA PELESTARIAN HUTAN MANGROVE OLEH KELOMPOK NELAYAN PRAPAT AGUNG MENGENING PATASARI KELURAHAN KUTA	PENGHARGAAN NASIONAL BIDANG LINGKUNGAN 2019	11 JULI 2019	Wakil Presiden RI
9	REKOR MURI SENAM YOGA TERTAWA PESERTA TERBANYAK	YOGA TERTAWA	13 JULI 2019	Wakil Direktur MURI
10	PIAGAM PENGHARGAAN ATAS KOMITMEN PEMKAB. BADUNG YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN BEBERAPA GEDUNG DI POLRESTA	SYUKURAN HUT BHAYANGKARA KE-73	15 JULI 2019	KAPOLDA BALI
11	PENGHARGAAN TOP 99 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (SINOVIK) 2019 Inovasi Badung Anti Kantong Plastik (Batik)	PROGRAM KEMENPAN RB ONE AGENCY ONE INOVATION	18 JULI 2019	Menteri PAN Dan RB





NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
12	PENGHARGAAN TOP 99 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (SINOVIK) 2019 Melalui Inovasi Fish Go	PROGRAM KEMENPAN RB ONE AGENCY ONE INOVATION	18 JULI 2019	Menteri PAN Dan RB
13	PENGHARGAAN TPID KATEGORI BERPRESTASI	RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2019	25 JULI 2019	Wakil Presiden RI
14	PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) 2019 KATEGORI NINDYA	PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	23 JULI 2019	Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI
15	JUARA UMUM UTSAWA DARMA GITA 2019	UTSAWA DARMA GITA PROVINSI BALI 2019	01 AGUSTUS 2019	Asisten Administrasi Pemprov. Bali
16	PENGHARGAAN PUBLIC SERVICE AWARD BALI 2019	MARKETEERS FESRIVAL (IMF) 2019	06 AGUSTUS 2019	Gubernur Bali
17	JUARA HARAPAN I NASIONAL DALAM LOMBA PERPUSTAKAAN UMUM TERBAIK (DESA/KELURAHAN) RINGKAT NASIONAL TAHUN 2019	LOMBA PERPUSTAKAAN UMUM TAHUN 2019	16 AGUSTUS 2019	Ketua Panitia Lomba Perpustakaan tahun 2019
18	PENGHARGAAN TANGGAP NARKOBA PEMKAB DAN KABUPATEN BADUNG	SEMINAR NASIONAL TANGGAP ANCAMAN NARKOBA	22 AGUSTUS 2019	Sekretaris BNN Pusat
19	PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) TINGKAT NASIONAL	PENILAIAN WAHANA TATA NUGRAHA (WTN)	15 SEPTEMBER 2019	Menteri Perhubungan RI
20	JUARA UMUM PORPROV BALI XIV 2019	PORPROV BALI XIV 2019		
21	PENGHARGAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)	PERINGATAN HARI AGRARIA DAN TATA RUANG NASIONAL	24 SEPTEMBER 2019	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Bali





NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
22	PENGHARGAAN ANUGERAH UDAYANA	SIDANG TERBUKA SENAT UNIVERSITAS UDAYANA	29 SEPTEMBER 2019	KETUA SENAT UNIVERSITAS UDAYANA
23	TROPY UTAMA PROKLIM (PROGRAM KAMPUNG IKLIM)	PENGHARGAAN NASIONAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	02 OKTOBER 2019	MENTERI LHK
24	PENGHARGAAN SINOPIK (KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK) TOP 99	PENGHARGAAN NASIONAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15 OKTOBER 2019	WAKIL PRESIDEN RI
25	TOP 45 DENGAN INOVASI BATIK (BADUNG ANTI KANTONG PLASTIK)	PENGHARGAAN NASIONAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15 OKTOBER 2019	WAKIL PRESIDEN RI
26	JUARA II KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2019	KELUARGA SADAR HUKUM	08 OKTOBER 2019	
27	PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BALI AWARD (PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK) TAHUN 2019	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALITBANG	10 OKTOBER 2019	KETUA KOMISI INFORMASI BALI
28	PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BALI AWARD (PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK) TAHUN 2019	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BKPSDM	10 OKTOBER 2019	KETUA KOMISI INFORMASI BALI
29	PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BALI AWARD (PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK) TAHUN 2019	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAPENDA/PESEDAHAN AGUNG	10 OKTOBER 2019	KETUA KOMISI INFORMASI BALI
30	PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BALI AWARD	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DINAS KEBUDAYAAN	10 OKTOBER 2019	KETUA KOMISI INFORMASI BALI





NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
	(PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK) TAHUN 2019			
31	PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BALI AWARD (PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK) TAHUN 2019	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	10 OKTOBER 2019	KETUA KOMISI INFORMASI BALI
32	PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BALI AWARD (PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK) TAHUN 2019	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DPMPTSP	10 OKTOBER 2019	KETUA KOMISI INFORMASI BALI
33	PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BALI AWARD (PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK) TAHUN 2019	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10 OKTOBER 2019	KETUA KOMISI INFORMASI BALI
34	PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI BALI AWARD (PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK) TAHUN 2019	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO	10 OKTOBER 2019	KETUA KOMISI INFORMASI BALI
35	PENGHARGAAN PRESTASI ISTIMEWA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)	PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II TAHUN 2019	12 OKTOBER 2019	BKPSDM PROVINSI BALI
36	PENGHARGAAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)	PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)	29 OKTOBER 2019	MENTERI KEUANGAN RI
37	PENGHARGAAN MOST POPULER LEADER IN SOSIAL MEDIA 2019	PUBLIK RELATION INDONESIA AWARD KE-5 JAMBORE PR INDONESIA 2019	31 OKTOBER 2019	PUBLIC RELATION INDONESIA





NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
38	PENGHARGAAN NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2019	RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	6 NOVEMBER 2019	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
39	PENGHARGAAN NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2019 PADA KATEGORI KOMITMEN PENERAPAN STANDAR LPSE: 2014	RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	6 NOVEMBER 2019	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
40	ANUGRAH KIHAJAR 2019 KATEGORI MADYA TINGKAT KABUPATEN	PERINGATAN HUT DASAWARSA IBUKOTA KABUPATEN BADUNG MANGUPURA	14 NOVEMBER 2019	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
41	PENGHARGAAN BUNDA PAUD BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019	APRESIASI BUNDA PAUD TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019	18 NOVEMBER 2019	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
42	PENGHARGAAN KABUPATEN SEHAT TINGKAT SWASTI SABA WISTARA	PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	19 NOVEMBER 2019	KEMENTERIAN KESEHATAN RI
43	PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK DPMPSTP	PENGHARGAAN MUTU PELAYANAN PUBLIK	22 NOVEMBER 2019	KEMENPAN RB
44	PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGHARGAAN MUTU PELAYANAN PUBLIK	22 NOVEMBER 2019	KEMENPAN RB
45	PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK RSUD MANGUSADA	PENGHARGAAN MUTU PELAYANAN PUBLIK	22 NOVEMBER 2019	KEMENPAN RB
46	PENGHARGAAN KABUPATEN TERBAIK NASIONAL DALAM PENERAPAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)	PENGHARGAAN ANUGERAH LHKPN TERBAIK NASIONAL	09 DESEMBER 2019	KPK RI
47	PENGHARGAAN PEDULI HAM	PENGHARGAAN PEDULI HAM DARI KEMENKUM RI	10 DESEMBER 2019	KEMENKUM HAM





NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
48	PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS DPMPSTP	PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS	11 DESEMBER 2019	KEMENPAN RB
49	PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2019	PENGHARGAAN LINGKUNGAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019	13 DESEMBER 2019	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
50	TROPI KALPATARU BIDANG PENYELAMATAN MANGROVE OLEH PATA SARI KUTA	PENGHARGAAN LINGKUNGAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019	13 DESEMBER 2019	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
51	TROPI PROKLIM DESA SANGEH	PENGHARGAAN LINGKUNGAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019	13 DESEMBER 2019	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
52	TROPI TOP 45 NASIONAL	PENGHARGAAN LINGKUNGAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019	13 DESEMBER 2019	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP





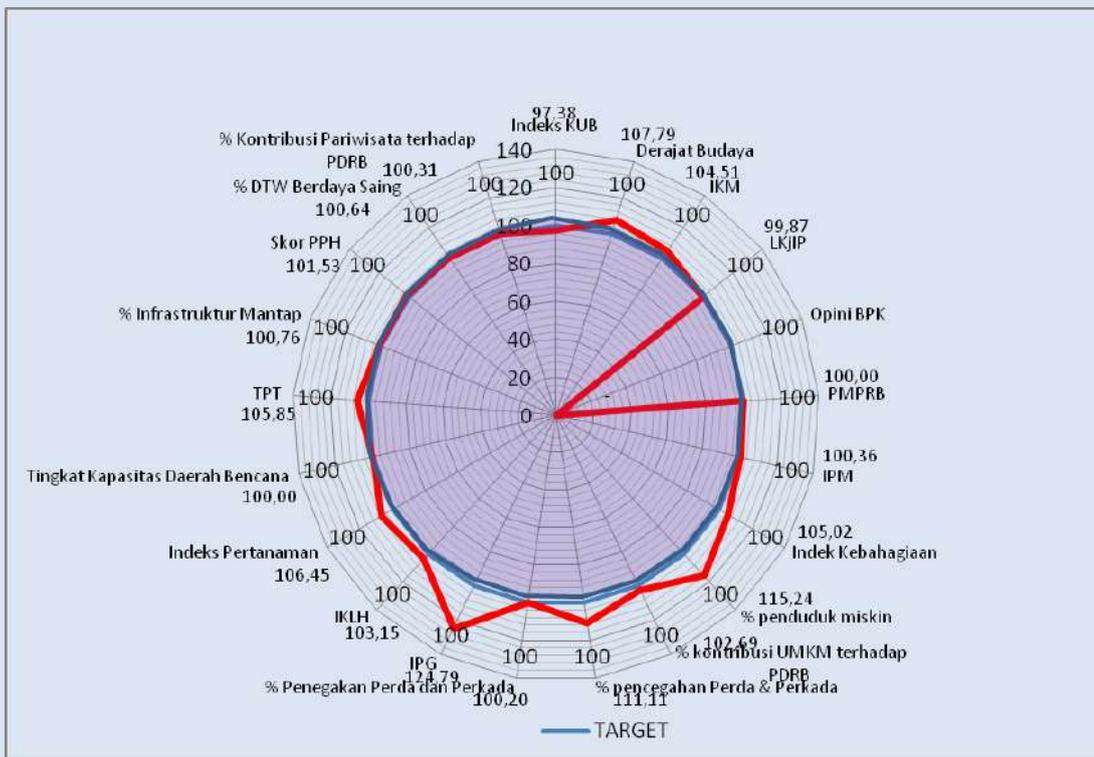
BAB IV PENUTUP



4.1 KESIMPULAN

1. Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 merupakan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Badung terhadap capaian kinerja sasaran strategis sesuai RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 beserta keberhasilan dan kegagalan serta perkembangan capaian IKU tahun sebelumnya sebagai perbandingan kinerja.
2. Dari 21 Indikator Kinerja Utama, yang dapat diukur sebanyak 20 Indikator dan 1 (satu) Indikator belum dapat diukur yaitu Opini BPK dari Badan Pemeriksa Keuangan karena data belum diumumkan/*publish*.
3. Capaian kinerja dari 20 indikator kinerja utama (IKU) yang diukur rata-rata sebesar 104,38%.
4. Hasil pengukuran terhadap terhadap indikator kinerja utama diperoleh hasil seperti berikut :
 - a. Melebihi target (>100%) sebanyak 16 indikator kinerja utama (80,00%)
 - b. Sesuai target (100%) sebanyak 2 indikator kinerja utama (10,00%)
 - c. dibawah target (<100%) sebanyak 2 indikator kinerja utama (10,00%)
5. Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) secara keseluruhan 20 indikator menunjukkan lebih dominan mencapai target yaitu sebanyak 18 indikator (90,00%) dan 2 indikator yang belum mencapai target (< 100%) sebesar 10.00%.
6. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 822.283.070.004,28,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 750.904.939.175,12,- dengan prosentase penyerapan sebesar 91,32%.





4.2. UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Secara keseluruhan capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun ada 2 sasaran strategis capaiannya masih dibawah 100%, yaitu meningkatnya toleransi hidup beragama dan meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten. Untuk meningkatkan capaian sasaran strategis tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung melakukan langkah perbaikan antara lain :

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya toleransi hidup beragama melalui :
 - a. Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*.
 - b. Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan.





- c. Membangun dan mengembangkan FGD dari tingkat Kabupaten sampai desa dan kelurahan, melaksanakan outing, dan jambore pada generasi muda lintas agama sehingga akan tumbuh pemahanan ajaran agama secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat
 - d. Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.
2. Upaya perbaikan terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten melalui perbaikan akuntabilitas sesuai rekomendasi hasil evaluasi dari kementerian PAN dan RB yaitu :
- a. Bagian organisasi melakukan bimbingan teknis dan pembinaan ke perangkat daerah untuk peningkatan pemahaman SAKIP oleh kepala perangkat daerah
 - b. Perangkat daerah melakukan penyempurnaan cascading kinerja dan optimalisasi proses bisnis pinerja utama organisasi
 - c. Bagian organisasi melakukan rapat koordinasi dengan BKPSDM untuk penyesuaian ukuran kinerja setiap jenjang jabatan sampai individu serta memastikan PK dan SKP berorientasi hasil
 - d. Bappeda melakukan identifikasi crosscutting program dan melakukan koordinasi antar unit kerja OPD dan secara kolaboratif
 - e. Bappeda dan bagian organisasi melakukan koordinasi dengan BPKP Provinsi Bali untuk pemanfaatan sistem informasi simda terintegrasi.
 - f. Inspektorat akan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Bupati Badung,

I NYOMAN GIRI PRASTA



Lampiran I :

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2		3	4	5
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	82,40
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	77
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	80
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4.	Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78,00
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5.	Opini BPK	Nilai	WTP
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6.	Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	BB
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,3
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8.	Indek Kebahagiaan	Nilai	72,5
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase penduduk miskin	%	2,15-2,10%
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,80



NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11.	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	90
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	85
13.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	13.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	75,87
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	67,94
		15.	Indeks Pertanaman	Nilai	205
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,325
17.	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	99,25
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20.	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	69,00
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,58



Lampiran II :

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	82,40	80,24	97,38
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	77	83	107,79
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	80	83,61	104,51
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4.	Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	78,00	77,9	99,87
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5.	Opini BPK	Nilai	WTP	Belum Rilis BPK	-
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6.	Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	BB	BB	BB (73,62)
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,3	81,59	100,36
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8.	Indek Kebahagiaan	Nilai	72,5	76,14	105,02
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase penduduk miskin	%	2,15-2,10%	1,78	115,24
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,80	8,01	102,69



NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11.	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	90	100	111,11
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	85	85,17	100,20
13.	Meningkatnya pengarasutamaan gender	13.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	75,87	94,68	124,79
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	67,94	70,077	103,15
		15.	Indeks Pertanaman	Nilai	205	218,22	106,45
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100,00
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,325	0,306	105,85
17.	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	99,25	100	100,76
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5	95,95	101,53
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20.	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	69,00	69,44	100,64
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,58	28,67	100,31
Rata-rata Kinerja Kabupaten							104,38



**Lampiran III :
Hasil Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Pemerintah
Kabupaten Badung Tahun 2019**

NO	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	4	5	921.603.100	902.766.600	97,96
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	5	43	206.403.401.812	175.906.119.032	85,22
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	9	16	9.659.695.800	1.929.551.300	19,98
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	6	23	5.018.274.427	4.492.179.517	89,52
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5	6	609.693.537	474.192.913	77,78
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	9	25	7.786.227.510	7.127.280.621	91,54
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	12	41	349.019.617.579	336.324.504.019	96,36
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	2	3	999.407.200	847.001.950	84,75
9	Menurunnya angka kemiskinan	5	25	6.912.057.370	6.373.125.435	92,20
10	Meningkatnya kontribusi sektor	11	25	6.417.187.891	5.719.651.339	89,13



NO	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	UMKM terhadap PDRB					
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	2	4	2.208.966.500	2.107.086.100	95,39
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	3	4	3.416.420.900	3.339.212.700	97,74
13	Meningkatnya pengarusutamaan gender	4	14	1.836.578.308	1.585.880.950	86,35
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	9	54	82.834.350.768	70.423.574.720	85,02
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	5	22	17.157.188.430	15.745.847.710	91,77
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	10	21	8.609.661.990	8.299.497.894	96,40
17	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	16	47	67.524.057.369	67.034.571.950	99,59
18	Meningkatnya produksi pangan harapan	9	31	14.743.056.362	12.817.964.000	86,94
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	3	25	29.580.398.252	28.835.767.269	97,48
20	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	1	3	625.224.899	619.163.156	99,03
	TOTAL	130	437	822.283.070.004	750.904.939.175	91,32



**Lampiran IV :
Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten
Badung Tahun 2019**

NO	Sasaran Strategis	Realisasi Sasaran	Realisasi Anggaran	Efektivitas	Efisiensi
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	97,38	97,96	- 0,58	Tidak Efisien
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	107,79	85,22	22,57	Efisien
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	104,51	19,98	84,54	Efisien
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	99,87	89,52	10,36	Efisien
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		77,78		
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	100,00	91,54	8,46	Efisien
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	100,36	96,36	3,99	Efisien
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	105,02	84,75	20,27	Efisien
9.	Menurunnya angka kemiskinan	115,24	92,20	23,04	Efisien
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	102,69	89,13	13,56	Efisien
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	111,11	95,39	15,72	Efisien
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	100,20	97,74	2,46	Efisien
13.	Meningkatnya pengarasutamaan gender	124,79	86,35	38,44	Efisien
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	104,80	85,02	19,78	Efisien



NO	Sasaran Strategis	Realisasi Sasaran	Realisasi Anggaran	Efektivitas	Efisiensi
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	106,45	91,77	14,67	Efisien
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	100,00	96,40	3,60	Efisien
17.	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	105,85	99,59	6,26	Efisien
18.	Meningkatnya produksi pangan harapan	100,76	86,94	13,81	Efisien
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	101,53	97,48	4,05	Efisien
20.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	100,64	99,03	1,61	Efisien
	Total	104,68	88,55	16,13	Efisien



LAMPIRAN V :

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Indeks kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	83,50	1 Meningkatkan toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama	Survey : 1)Hubungan sosial antar kelompok agama, 2)Eksistensi keagamaan, konflik dan resolusi konflik, 3)Kebijakan pemerintah dan 4)Potensi lokal	Balitbang, Bakesbangpol, Disbud, Setda (Bag.Kesra)
				2 Meningkatkan pelestarian adat dan budaya	2 Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	(Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (Jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2	Disbud, Bapenda/Pasedahan Agung



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
2 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	2 Indeks kepuasan masyarakat	Survey indeks kepuasan masyarakat	82	3 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3 Indeks kepuasan masyarakat	Survey indeks kepuasan masyarakat	Balitbang, Seluruh Perangkat Daerah
3 Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	3 Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	80,10 (A)	4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kabupaten	4 Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Setda (Bagian Organisasi), Inspektorat, Bappeda
	4 Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan	WTP	5 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik Daerah	5 Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan	BPKAD, Inspektorat, Setda (Bag.Pembangunan), seluruh Perangkat Daerah



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru				
	5	Kategori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi	A	6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6	Kategori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi	Inspektorat Setda (Bagian Organisasi)	
4	Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	82,3	7	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks kebahagiaan	Balitbang, Disdikpora, Diskes, Diskop UKMP, SRUD
		7	Indeks kebahagiaan	Survey tingkat kebahagiaan masyarakat	74,5	8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8	Indeks Kebahagiaan	Survey tingkat kebahagiaan masyarakat	Balitbang, Seluruh Perangkat Daerah
		8	Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk	2,05 - 2,00%	9	Menurunnya angka kemiskinan	9	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	Dinsos, Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
		kali 100%					
5 Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	9 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	7,91%	10 Meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	Diskop UKMP, Disperinaker, Setda (Bag.Perekonomian)
6 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	10 Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	100%	11 Meningkatkan pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11 Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Satpol PP, Bakesbangpol, Seta (Bagian Hukum dan Ham), seluruh Kecamatan



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
				12 Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada	12 Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Satpol PP, Bakesbangpol, Seta (Bagian Hukum dan Ham)
7 Terwujudnya Pengarasutamaan Gender	11 Indeks Pembangunan Gender	$IPG = \frac{1}{3}(X + Y + Z)$ Dimana : Xede(1):Xede untuk harapan hidup, Xede(2):Xede untuk harapan pendidikan, I(inc-dls):Indeks distribusi pendapatan	76,13	13 Meningkatkan pengarasutamaan gender	13 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dimana: Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dls): Indeks distribusi pendapatan	DP2KBP3A, Balitbang, Disperinaker, Dinsos, Seluruh Perangkat Daerah



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
8 Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	12 Indeks pencemaran lingkungan hidup	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan/lahan	69,40	14 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14 Indek Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Penghitungan Indikator dari : Indeks Kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan	DLHK, DPKP, DPUPR, Diskes
					15 Indeks Pertanaman (IP)	Luas tanam dibagi luas lahan x 100% (dalam setahun)	Satpol PP, Disperpa, Setda (Bag.SDA)
9 Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	13 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah pemenuhan kapasitas dibagi jumlah kebutuhan kapasitas kali 100%	100%	15 Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana	16 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Survei kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	BPBD,DPUPR, DPKP, Dinsos, Diskarmat, Satpol PP, Diskes, RSUD



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
10 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	14 Tingkat pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	0,31%	16 Meningkatkan daya saing tenaga kerja	17 Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	Disperinaker, Bappeda, Dispar, Dinsos, Diskop UKMP
11 Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	15 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	100%	17 Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas	18 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	DPUPR, Disbud, Bappeda, DPKP, Diskominfo, Setda(Bag. Pembangunan)
12 Meningkatnya ketersediaan pangan	16 Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	95,50%	18 Meningkatkan produksi pangan nabati dan hewani	19 Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	Disperpa, Diskan, DPUPR
13 Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	17 Indeks daya saing destinasi pariwisata	Suevei indeks daya saing dstinasi pariwisata	75%	19 Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing	20 Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100%	Dispar, DPUPR, Disbud



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
				20 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Nilai produk sektor pariwisata dibagi total nilai PDRB kali 100%	Dispar, Disbud, Diperpa, Diskan, Diskominfo, Diskes, DLHK, PUPR

